

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana  
Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi  
Kalimantan Barat

**SKRIPSI**



Oleh:

Nama : Silo Sumarso

NIM : 18313172

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**  
2022

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat

## SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir  
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1  
Program Studi Ekonomi Pembangunan,  
pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Silo Sumarso

NIM : 18313172

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
2022

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UII. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 6 September 2022

Penulis,



Silo Sumarso

## PENGESAHAN SKRIPSI

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat

Nama : Silo Sumarso

NIM : 18313172

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 5 September 2022  
telah disetujui dan disahkan oleh  
Dosen Pembimbing,



Sahabudin Sidiq, Dr., S.E., M.A.

الجمهورية الإسلامية اندونيسية  
الجامعة الإسلامية الاندونيسية

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI**

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN  
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

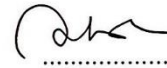
Disusun Oleh : **SILO SUMARSO**

Nomor Mahasiswa : **18313172**

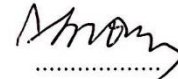
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Jumat, 14 Oktober 2022**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Sahabudin Sidiq,Dr.,S.E., M.A.




Penguji : Indah Susantun,Dra.,M.Si.



Mengetahui  
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia



  
SE., M.Si.,Ph.D.,CFrA.

## PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan untuk.

1. Kedua orang tua yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan kewajiban berkuliah sampai saat ini.
2. Orang yang saya cintai dan sayangi. Terima kasih atas dukungan, doa, perhatian dan nasihat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil Alamin*, segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat”. *Shalawat* serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan kezaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak baik material maupun non material. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada.

1. Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, Kesehatan, hidayah-Nya dan atas ijin-Nya serta ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan diberi kemudahan dan kelancaran sehingga hasilnya baik.
2. Kedua orang tua saya yaitu Ibu dan Bapak yang sangat saya sayangi, serta semua keluarga besar tercinta, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, materi maupun non materi, serta doa yang tiada henti-hentinya kepada peneliti.
3. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D. sebagai ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan.
6. Bapak Sahabudin Sidiq, Dr.,S.E., M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu disela kesibukannya untuk membimbing dan memotivasi serta kesempatannya kepada peneliti untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang peneliti hadapi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh Dosen Ilmu Ekonomi dan Karyawan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

8. Serta semua pihak yang telah memberikan dukungan, doa dan motivasi.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Namun peneliti telah melakukan semampu dan semaksimal mungkin dalam pembuatan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kerendahan hati peneliti menerima saran dan kritik yang sifatnya *konstruktif* dari berbagai pihak. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. peneliti memohon *ridha* dan *maghfirah*-Nya, semoga segala dukungan serta bantuan semua pihak mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Swt. dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan para pembaca.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Yogyakarta, 5 September 2022

Penulis,



Silo Sumarso



## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme .....	ii
Halaman Pengesahan Skripsi .....	iii
Halaman Pengesahan Ujian .....	vi
Halaman Persembahan .....	v
Halaman Kata Pengantar .....	vi
Halaman Daftar Isi .....	viii
Halaman Daftar Tabel .....	xi
Halaman Daftar Gambar .....	xii
Halaman Daftar Lampiran .....	xiii
Halaman Abstrak .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	10
2.1.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu .....	12
2.2 Landasan Teori .....	15
2.2.1 Teori Belanja Modal .....	15
2.2.1.1 Kriteria Belanja Modal .....	15
2.2.1.2 Jenis-Jenis Belanja Modal .....	15
2.2.1.3 Ciri-Ciri Belanja Modal .....	16
2.2.1.4 Kebijakan Belanja Modal .....	16
2.2.2 Pendapatan Asli Daerah .....	17
2.2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	17
2.2.2.2 Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah .....	17

2.2.3	Dana Alokasi Umum .....	18
2.2.3.1	Pengertian Dana Alokasi Umum .....	18
2.2.3.2	Formula dan Faktor-Faktor Penentuan Dana Alokasi Umum per Daerah .....	18
2.2.4	Dana Alokasi Khusus .....	19
2.2.4.1	Pengertian Dana Alokasi Khusus .....	19
2.2.4.2	Faktor-Faktor Penentu Dana Alokasi Khusus .....	20
2.2.5	Hubungan Keuangan Pusat-Daerah .....	20
2.3	Pengaruh Antar Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen.....	20
2.3.1	Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal .....	20
2.3.2	Hubungan Antara Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal .....	21
2.3.3	Hubungan Antara Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal .....	21
2.4	Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian .....	22
BAB III METODE PENELITIAN .....		23
2.1	Jenis dan Sumber Data .....	23
2.2	Definisi Variabel Operasioanl .....	23
2.3	Metode Analisis Data .....	24
2.3.1	Analisis Deskriptif .....	24
2.3.2	Analisis Regresi Data Panel .....	24
2.3.2.1	<i>Common Effect Model</i> .....	24
2.3.2.2	<i>Fixed Effect Model</i> .....	25
2.3.2.3	<i>Random Effect Model</i> .....	25
2.3.3	Uji Asumsi Klasik .....	25
2.3.3.1	Uji Normalitas .....	25
2.3.3.2	Uji Autokorelasi .....	25
2.3.3.3	Uji Multikolinearitas .....	26
2.3.3.4	Uji Heteroskedastisitas .....	26
2.3.4	Pengujian Hipotesis .....	26

2.3.4.1	Uji Parsial (Uji T) .....	26
2.3.4.2	Uji Simultan (Uji F) .....	27
2.3.4.3	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	27
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....		28
4.1	Hasil Analisis .....	28
4.1.1	Analisis Deskriptif .....	28
4.1.2	Regresi Data Panel .....	30
4.1.2.1	Metode Estimasi .....	30
4.1.3	Uji Asumsi Klasik .....	32
4.1.3.1	Uji Normalitas .....	32
4.1.3.2	Uji Autokorelasi .....	32
4.1.3.3	Uji Multikolinearitas .....	33
4.1.3.4	Uji Heteroskedastisitas .....	34
4.1.4	Pengujian Hipotesis .....	35
4.1.4.1	Uji Parsial (Uji T) .....	35
4.1.4.2	Uji Simultan (Uji F) .....	37
4.1.4.3	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	38
4.2	Pembahasan .....	38
4.2.1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal .....	38
4.2.2	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal .....	39
4.2.3	Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal .....	41
4.2.4	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Secara Simultan Terhadap Belanja Modal .....	42
BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI .....		44
5.1	Simpulan .....	44
5.2	Implikasi .....	44
DAFTAR PUSTAKA .....		46
LAMPIRAN .....		50

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pendapatan dan Belanja Daerah Kalimantan Barat 2022 .....	2
Tabel 1.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 dan 2022 .....	3
Tabel 1.3 Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 dan 2022 ..	4
Tabel 1.4 Sumber Pendapatan Asli Daerah Kalimantan Barat Tahun 2017-2021 (Dalam Jutaan Rupiah) .....	5
Tabel 1.5 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kalimantan Barat Tahun 2017-2021 (Dalam Jutaan Rupiah) .....	5
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif .....	28
Tabel 4.2 Model Estimasi .....	30
Tabel 4.3 Hasil Uji <i>Chow</i> .....	31
Tabel 4.4 Hasil Uji <i>Hausman</i> .....	31
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi .....	33
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas .....	34
Tabel 4.7 Hasil Uji <i>Glejser</i> .....	34
Tabel 4.8 Hasil Uji Parsial (Uji T) .....	35
Tabel 4.9 Hasil Uji Simultan (Uji F) .....	37
Tabel 4.10 Hasil Uji Determinasi (Uji $R^2$ ) .....	38

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian .....	22
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas .....	32



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabulasi Data Penelitian .....	51
Hasil Olahan Data .....	53



## ABSTRAK

Alokasi anggaran pendapatan dan belanja pada APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021. Alokasi anggaran pendapatan pada APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 mengalami kontraksi sebesar  $-16,19\%$  (yoy) menjadi Rp 5.393 miliar. Besaran Belanja Daerah tergantung pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah. Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat salah satu sumber penerimaan daerah adalah Dana Alokasi Umum (DAU) pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Selain DAU dana perimbangan yang lain adalah DAK, merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat memengaruhi belanja modal.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh berasal dari badan resmi yang diperoleh melalui informasi akurat (BPS Kalimantan Barat, 2022). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, regresi data panel, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji parsial (uji t), uji simultan (uji f), dan uji koefisien determinasi ( $r^2$ ).

Hasil penelitian ini menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, serta secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal.

**Kata Kunci :** Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

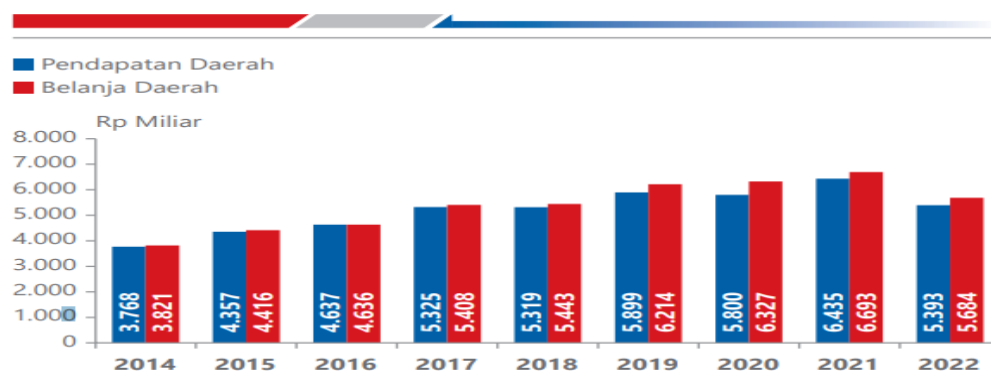
Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan. Otonomi Daerah perwujudan dari dianutnya asas desentralisasi, diharapkan akan dapat memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Kewenangan yang diterima oleh Daerah melalui Otonomi Daerah, akan memberikan kebebasan kepada Daerah dalam hal melakukan berbagai tindakan yang diharapkan akan sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat di wilayahnya. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 yang menekankan pada pelaksanaan otonomi daerah berupa desentralisasi fiskal dengan konsep uang mengikuti fungsi (*money follows function*). Untuk terselenggaranya Otonomi Daerah dan desentralisasi fiskal diperlukan adanya suatu kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber pendapatan atau keuangan sendiri.

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan. Dengan adanya peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga pemerintah memberikan kualitas pelayanan publik yang baik. Menurut Undang-undang No.32 Tahun 2004 pasal 157 pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Disamping itu untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, pemerintah pusat juga mentransfer dana perimbangan untuk pemerataan pendanaan dalam pembangunan daerah. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Deddi et al, 2007).



Pemerintah Pusat diharapkan agar digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Terkait pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang berdampak kepada besar atau kecilnya belanja modal yang ada di Indonesia peneliti lebih memfokuskan ke salah satu provinsi di Indonesia yaitu provinsi Kalimantan Barat. Provinsi Kalimantan Barat pada dasarnya implikasi APBD pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021. Terjadinya penurunan anggaran ini tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti anggaran pendapatan dan belanja pada APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.1** Pendapatan dan Belanja Daerah Kalimantan Barat 2022



Sumber: BKAD Provinsi Kalbar 2022

Berdasarkan tabel 1.1 maka dapat dilihat terkait dengan perkembangan APBN dari tahun ke tahun yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kalimantan Barat. Apabila dikaji secara mendalam dapat dilihat pada tahun 2022 pendapatan asli daerah di wilayah ini mengalami penurunan hingga mencapai -6,74%. Secara lebih rinci pendapatan asli daerah pada tahun 2021 berada di angka Rp.2.865,96 miliar sedangkan pada tahun 2022 nilai PAD menurun hingga berada di angka Rp.2.672,83 miliar. Selain itu, dalam kajian yang lebih mendalam aspek dana perimbangan juga mengalami penurunan. Pada tahun 2021 dana perimbangan yang ada di wilayah Kalimantan Barat mencapai Rp.3.794,12 miliar sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi Rp.2.655,22 miliar. Kemudian untuk memudahkan pemahaman tersebut maka berikut merupakan data yang berkenaan dengan pelaksanaan atau realisasi APBD yang

digunakan oleh pemerintah daerah provinsi Kalimantan Barat pada periode tahun 2021-2022. Terkait anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.2** Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 dan 2022

Uraian Pos APBD	Pagu		Realisasi s.d. Tw I		% Realisasi Tw I		% Perubahan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	APBD	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	2.865,96	2.672,83	478,13	604,80	16,68	22,63	(6,74)	26,49
- Pajak Daerah	2.206,65	2.343,27	351,57	468,12	15,93	19,98	6,19	33,15
- Retribusi Daerah	41,26	13,45	4,67	2,94	11,33	21,82	(67,40)	(37,21)
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	93,39	96,37	95,35	100,61	102,10	104,40	3,19	5,52
- Lain-Lain PAD Yang Sah	524,65	219,74	26,55	33,14	5,06	15,08	(58,12)	24,84
Dana Perimbangan	3.794,12	2.655,22	539,33	541,32	14,21	20,39	(30,02)	0,37
- Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	232,08	205,26	83,46	12,83	35,96	6,25	(11,56)	(84,63)
- Dana Alokasi Umum	1.624,27	1.572,24	406,07	524,08	25,00	33,33	(3,20)	29,06
- Dana Alokasi Khusus	1.937,76	877,72	49,80	4,41	2,57	0,50	(54,70)	(91,14)
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	16,64	5,50	-	-	-	-	(66,96)	-
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	3,78	59,38	-	-	-	-	1.471,76	-
- Hibah	3,78	59,38	-	-	-	-	1.471,73	-
- Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bantuan Keuangan dari Kab/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Pendapatan Daerah</b>	<b>6.680,49</b>	<b>5.392,93</b>	<b>1.017,46</b>	<b>1.146,13</b>	<b>15,23</b>	<b>21,25</b>	<b>(19,27)</b>	<b>12,65</b>

Sumber: BKAD Provinsi Kalbar 2022

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dalam pengaplikasiannya pada tahun 2022 tepatnya perolehan pajak mencapai Rp.468,12 miliar. Sedangkan dalam aspek hasil pengelolaan kekayaan daerah juga mengalami peningkatan hingga mencapai Rp.100,62 miliar. Sedangkan dari sudut pandang pendapatan asli daerah juga mengalami peningkatan hingga mencapai Rp.33,14 miliar. Retribusi daerah yang diperoleh provinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan pada tahun 2022 hingga mencapai Rp.2,94 miliar. Namun dalam data di atas dapat dilihat bahwasanya jumlah APBD yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022 mengalami penurunan yang berada di angka Rp.5,648,41 miliar sedangkan pada tahun 2021 jumlah APBD berada di kisaran angka Rp.6.133,69 miliar. Tentunya penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling memengaruhi satu dengan yang lainnya. Kemudian besarnya pendapatan asli daerah di provinsi Kalimantan Barat tentunya akan berdampak pada belanja modal di provinsi Kalimantan Barat. Besarnya belanja daerah di provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.3** Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 dan 2022

Uraian Pos APBD	Pagu		Realisasi s.d. Tw I		% Realisasi Tw I		% Perubahan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	APBD	Realisasi
Belanja	6.000,45	4.532,38	305,16	251,59	5,09	5,55	(24,47)	(17,55)
- Belanja Pegawai	1.774,16	1.630,96	215,00	183,55	12,12	11,25	(8,07)	(14,62)
- Belanja Barang	2.092,84	1.728,84	90,01	62,37	4,30	3,61	(17,39)	(30,71)
- Hibah	224,38	249,33	-	3,39	-	1,36	11,12	-
- Bantuan Sosial	5,73	7,59	-	0,14	-	1,88	32,56	-
- Belanja Modal	99,66	885,66	0,16	2,14	-	0,24	788,68	-
- Belanja Tidak Terduga	1.670,43	30,00	-	-	0,01	-	(98,20)	(100,00)
Transfer	133,24	1.152,03	-	-	-	-	764,60	-
- Bagi Hasil Pajak	1.035,04	1.089,64	-	-	-	-	5,27	-
- Bantuan Keuangan	1.035,04	62,40	-	-	-	-	(93,97)	-
<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>6.133,69</b>	<b>5.684,41</b>	<b>305,16</b>	<b>251,59</b>	<b>4,98</b>	<b>4,43</b>	<b>(7,32)</b>	<b>(17,55)</b>

Sumber: BKAD Provinsi Kalbar 2022

Berdasarkan tabel 1.3 di atas dapat dilihat secara mendalam terkait dengan belanja atau pengeluaran yang digunakan pada tahun 2022. Pengeluaran yang dilakukan pada tahun 2022 belanja yang dimiliki oleh belanja pegawai, belanja barang, hibah, dan lain sebagainya. Besar atau kecilnya belanja daerah di provinsi Kalimantan Barat tentunya banyak faktor yang melatarbelakangi hal tersebut salah satunya adalah pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh wilayah Kalimantan Barat yang pada dasarnya bersumber dari beberapa aspek mulai dari perpajakan hingga pada pengelolaan potensial kekayaan yang dimiliki oleh daerah. Apabila dikaji secara mendalam maka pada dasarnya implikasi pendapatan daerah yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan pada tahun 2017 hingga 2021 pendapatan asli daerah dengan penerimaan paling besar bersumber dari penghasilan pajak. Sedangkan untuk penghasilan yang bersumber dari retribusi daerah mengalami naik turun. Dengan dinamika besaran pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh provinsi Kalimantan Barat yang mengalami terus peningkatan menjadikan wilayah tersebut tentunya semakin berkembang (Sari Rusmita, 2016).

**Tabel 1.4** Sumber PAD Kalimantan Barat Tahun 2017-2021 (Dalam Jutaan Rupiah)

No	PAD	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pajak daerah	1.678.437	1.791.424	1.712.190	1.863.827	1.965.221
2	Retribusi daerah	124.637	127.990	126.345	157.874	163.837
3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	63.839	71.838	75.840	77.232	81.920
4	Pendapatan lain-lain	59.383	58.728	61.939	63.992	67.382
Total		1.926.296	2.049.980	1.976.314	2.162.925	2.278.360

Sumber Data: BPS Kalbar, 2021

**Tabel 1.5** Target dan Realisasi PAD Kalimantan Barat Tahun 2017-2021 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2017	1.956.838	1.912.912	99,23
2018	1.987.912	1.902.728	98,34
2019	2.003.829	1.992.829	99,03
2020	2.012.738	2.000.729	98,42
2021	2.183.920	2.113.920	97,88

Sumber Data: BPS Kalbar, 2021

Berdasarkan tabel di atas maka pada dasarnya dapat dilihat bahwa kehadiran dari pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh Kalimantan Barat di antara tahun 2017 hingga 2021 mengalami dinamika yang tidak dapat melampaui target. Tentunya dinamika ini terjadi dikarenakan beberapa faktor yang memengaruhinya. Dengan dinamika yang terjadi menjadikan munculnya perkembangan pendapatan asli daerah di wilayah provinsi Kalimantan Barat. Hal inilah yang menjadikan pemerintahan provinsi Kalimantan Barat berupaya untuk meningkatkan penerimaan lainnya agar hasil

tersebut dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh pemerintahan daerah bagi kemajuan masyarakat desa.

Dalam dinamika pendapatan asli daerah tersebut tentunya tidaklah hanya sumber pendapatan pajak saja. Namun dalam implikasinya terdapat beberapa aspek penerimaan yang memiliki peranan cukup penting dalam menentukan rancangan APBD yang dimiliki oleh tiap daerah. Sumber penerimaan tersebut adalah dana perimbangan. Tentunya pandangan tersebut didukung oleh regulasi yang termuat dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 terkait dengan Pemerintahan Daerah. Kehadiran dari dana alokasi umum dalam implikasinya menekankan pada pemerataan dan juga unsur keadilan dengan tujuan untuk mengurus kegiatan pemerintahan. Dana alokasi umum merupakan konsep dana yang dimiliki oleh pemerintah pusat yang kemudian disalurkan ke pemerintah daerah dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi daerah dalam mengurus dan mengelola keuangan daerah demi terwujudnya kebutuhan yang merata (Theresia Plamboyan Sianturi & Kus Tri Andryarini, 2020)

Kemudian tidak hanya dana alokasi umum saja namun ada juga dana alokasi khusus yang merupakan salah satu bagian juga dari penghasilan pemerintahan daerah. Kehadiran dari dana alokasi khusus bertujuan adalah untuk mengarahkan kegiatan pembangunan hingga perbaikan sarana prasarana yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya dengan kemunculan dana alokasi khusus tersebut pemerintah daerah berharap mampu memengaruhi besaran belanja modal dengan tujuan untuk menambah aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik bagi masyarakat daerah (Nira Putri Permatasari, 2014).

Dari penjelasan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di provinsi Kalimantan Barat. Alasannya diketahui bahwa belanja daerah di provinsi Kalimantan Barat dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Belanja modal yang terdapat di provinsi Kalimantan Barat bertujuan untuk memajukan wilayah provinsi Kalimantan Barat sendiri. Selanjutnya dalam membiayai belanja daerah, provinsi Kalimantan Barat menggunakan beberapa anggaran seperti pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, serta dana alokasi khusus. Pendapatan asli daerah provinsi Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pendapatan asli daerah diperoleh melalui berbagai instrumen salah satunya dalam pengutan pajak kepada masyarakat di provinsi

Kalimantan Barat. Besarnya pendapatan asli daerah di provinsi Kalimantan Barat akan sangat membantu pemerintahan provinsi Kalimantan Barat dalam membiayai belanja modal untuk provinsi Kalimantan Barat sendiri.

Kemudian dalam penelitian ini untuk membiayai belanja modal di provinsi Kalimantan Barat tidak hanya berasal dari pendapatan asli daerah saja, namun juga menggunakan dana dari pemerintah pusat seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Anggaran dana alokasi umum dan dana alokasi khusus ini dimanfaatkan sebaik mungkin oleh provinsi Kalimantan Barat dalam memajukan pemerintahannya terutama dalam belanja modal.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah untuk melakukan penelitian ini adalah.

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal di kabupaten atau kota provinsi Kalimantan Barat?
2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal di kabupaten atau kota provinsi Kalimantan Barat?
3. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal di kabupaten atau kota provinsi Kalimantan Barat?
4. Apakah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal di kabupaten atau kota provinsi Kalimantan Barat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah.

1. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal di kabupaten atau kota provinsi Kalimantan Barat.
2. Untuk menganalisis pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal di kabupaten atau kota provinsi Kalimantan Barat.
3. Untuk menganalisis pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja modal di kabupaten atau kota provinsi Kalimantan Barat.

4. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara simultan terhadap belanja modal di kabupaten atau kota provinsi Kalimantan Barat.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari tujuan penelitian di atas bahwa manfaat penelitian yang dikaji sebagai berikut.

1. Manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak pemerintahan daerah Kalimantan Barat untuk mengkaji secara mendalam terkait dengan sistem keuangan yang dimiliki dan juga diterapkan secara mendalam sehingga mampu menyesuaikan dengan kebijakan yang akan diambil.
2. Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah sebagai sarana menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang berdampak terhadap belanja modal.
3. Manfaat penelitian ini juga sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi dan dalam memperoleh gelar sarjana.
4. Manfaat penelitian ini juga sebagai literatur ataupun referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji ulang terkait pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang berdampak terhadap belanja modal.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada dasarnya bab ini menjadi bab awal yang memuat terkait dengan latar belakang permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga termuat terkait dengan beberapa komponen pertanyaan yang dijadikan sebagai landasan pembatas variabel penelitian. Adapun tujuan serta manfaat yang diharapkan dari penelitian ini.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

Berbeda dengan bab sebelumnya, pada bab ini mengkaji secara mendalam terkait dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Tentunya dalam melaksanakan kegiatan penelitian, kehadiran dari teori menjadi penting adanya karena dijadikan sebagai landasan pemikiran dalam penelitian. Tak hanya itu saja, dalam

penelitian ini juga memuat terkait dengan hipotesis dan kerangka pemikiran yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dan pembaca dalam memahami penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Selanjutnya dalam bab ini berisikan terkait dengan pelaksanaan kegiatan penelitian yang ditentukan oleh metode yang digunakan. Tak hanya itu saja, dalam bab ini juga menjadi sebuah ringkasan secara mendalam terkait dengan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti yang didasari pada metode yang dipilih.

### **BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini pada dasarnya menjadi bab yang mengungkapkan hasil dari perhitungan yang telah dilakukan. Kemudian hasil perhitungan tersebut dilakukan pembahasan yang kemudian dikaitkan dengan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

### **BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI**

Bab ini menjadi bab terakhir yang pada dasarnya berisikan terkait dengan kesimpulan dari berbagai pembahasan yang telah disampaikan di bab sebelumnya. Tak hanya itu saja, dalam bab ini juga memuat terkait dengan implikasi atau saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi beberapa pihak lainnya.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Liana Dwi Astuti dan Titik Mildawati (2019) dengan judul penelitian “Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Daerah Pemerintahan dari 34 Provinsi”. Metode analisis yang digunakan pada penelitian terdahulu ini adalah analisis regresi linear berganda. Pada penelitian terdahulu ini menggunakan alat bantu berupa SPSS versi 19 dalam pengolahan data. Hasil dari penelitian terdahulu ini adalah bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap perkembangan belanja modal yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Kemudian DAK berpengaruh negatif terhadap nilai atau besaran belanja modal yang harus dikeluarkan oleh tiap-tiap daerah. Hal ini terjadi dikarenakan DAK pada dasarnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan secara khusus.

Imam Khulwani dkk. (2022) dengan judul penelitian “Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta Tahun 2016-2020”. Dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penggunaan penelitian kuantitatif dengan sumber data yang diperoleh dari laman *website* kementerian keuangan yang termasuk dalam data sekunder (Kemenkeu.go.id). Kemudian untuk mendukung penelitian ini juga menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda yang dibantu pengolahan datanya dengan SPSS yang merupakan versi 25. Hasil dari penelitian terdahulu ini adalah bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, kemudian DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Selanjutnya DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Kemudian secara simultan bahwa PAD, DAU dan DAK berpengaruh terhadap belanja

Sari Rusmita (2016) dengan judul penelitian “Pengaruh DAU dan PAD Terhadap Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat”. Objek penelitian ini berfokus pada pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Barat. Metode analisis yang digunakan pada penelitian terdahulu ini adalah analisis regresi linear berganda yang dibantu pengolahan datanya dengan SPSS yang merupakan versi 22. Hasil penelitian ini adalah bahwa DAU dan PAD secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.

Tituk Dyah Widajantie (2021) dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur”. Penelitian ini berfokus pada kajian yang mendalam akan APBD yang dimiliki oleh wilayah provinsi Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan pada penelitian terdahulu ini adalah analisis regresi linear berganda yang dibantu pengolahan datanya dengan *E-views* versi 8. Hasil dari penelitian terdahulu ini adalah bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk DAK tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

Theresia Plamboyan Sianturi dan Kus Tri Andyarini (2020) dengan judul penelitian “Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018”. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif yang menggunakan sampel penelitian berupa 33 Kabupaten/Kota yang ada di provinsi Sumatera Utara. Untuk menguji tingkat keterpengaruhan yang dimiliki oleh masing-masing variabel, peneliti menggunakan pengujian hipotesis berupa regresi data panel yang dibantu proses pengujiannya dengan menggunakan *Eviews* 8. Hasil dari penelitian terdahulu ini adalah bahwa PAD dan DAU baik secara parsial maupun simultan keduanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Yulianus Lisa dkk. (2017) dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal di Kota Semarang”. Metode analisis yang digunakan pada penelitian terdahulu ini adalah analisis regresi linear berganda yang dibantu pengolahan datanya dengan SPSS versi 22. Hasil dari penelitian ini pada dasarnya menunjukkan bahwasanya pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki nilai yang positif terhadap pengeluaran yang terjadi secara langsung ataupun pengeluaran yang terjadi secara tidak langsung. Tak hanya itu saja, dalam aspek pertumbuhan ekonomi pun, kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang besar dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dalam aspek ekonomi.

Alvira Rahmi Syafitri dan Efendri (2020) dengan judul penelitian “Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal di Indonesia Tahun 2014-2019”. Metode analisis yang digunakan pada penelitian terdahulu ini adalah analisis regresi linear berganda. Berfokus pada sistematika penelitian kuantitatif maka dilakukanlah

penentuan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang dalam hasilnya dengan menggunakan 400 pemerintahan kabupaten/kota pada rentang periode tahun 2014 hingga 2019. Alat analisis dalam penelitian terdahulu ini menggunakan STATA versi 16. Hasil dari penelitian terdahulu ini adalah bahwa terdapat tidak terdapat pengaruh yang signifikan yang dimiliki oleh PAD terhadap belanja modal. Begitu juga dengan DAU yang sama pula tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Tetapi berbanding terbalik dengan DAK yang memiliki pengaruh terhadap belanja modal pemerintah Kabupaten/Kota.

Bobby Andi Irawan (2016) dengan judul penelitian melakukan penelitian “Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH Terhadap Belanja Modal di Indonesia Tahun 2013-2014”. Metode analisis yang digunakan pada penelitian terdahulu ini adalah analisis regresi linear berganda. Alat analisis dalam penelitian terdahulu ini menggunakan STATA versi 15. Dalam penelitian ini menyatakan bahwasanya berdasarkan laporan yang dimiliki oleh Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi se Indonesia dalam periode tahun 2013 hingga 2014 menyatakan aspek yang dimiliki oleh PAD, DAU dan juga DAK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai belanja modal yang dimiliki oleh provinsi sedangkan aspek DBH memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal provinsi yang ada di wilayah Indonesia.

### **2.1.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu**

Adapun perbedaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Liana Dwi Astuti dan Titik Mildawati (2019) metode yang digunakan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan analisis regresi linear berganda dengan pendekatan kuantitatif. Kemudian perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terkait objek yang diteliti dan alat analisis data. Pada penelitian terdahulu ini objek penelitiannya adalah seluruh provinsi yang ada di Indonesia dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 19 dalam pengolahan data, sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanyalah provinsi Kalimantan Barat dan menggunakan *E-views* versi 9 dalam alat pengolahan data.
2. Imam Khulwani dkk. (2022) metode yang digunakan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan analisis regresi linear berganda

dengan pendepatan kuantitatif. Kemudian perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terkait objek yang diteliti dan periode waktu penelitian serta alat bantu dalam pengolahan data. Pada penelitian terdahulu ini objek penelitiannya adalah provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta dengan periode waktu penelitian tahun 2016-2020 dan menggunakan SPSS versi 25 dalam pengolahan data, sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah provinsi Kalimantan Barat dengan rentang waktu penelitian dari tahun 2017-2021 dan menggunakan *E-views* versi 9 dalam alat pengolahan data.

3. Sari Rusmita (2016) metode yang digunakan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan analisis regresi linear beganda dengan pendepatan kuantitatif. Kemudian perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dalam pengolahan data. Pada penelitian terdahulu ini menggunakan SPSS versi 22 dalam pengolahan data, sedangkan alat bantu yang dilakukan oleh peneliti menggunakan *E-views* versi 9 dalam alat pengolahan data.
4. Tituk Dyah Widajantie (2021) metode yang digunakan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan analisis regresi linear beganda dengan pendepatan kuantitatif. Kemudian perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terkait objek yang diteliti dan alat bantu dalam pengolahan data. Pada penelitian terdahulu ini objek penelitiannya adalah provinsi Jawa Timur dan menggunakan *E-views* versi 8 dalam pengolahan data, sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah provinsi Kalimantan Barat dan menggunakan *E-views* versi 9 dalam alat pengolahan data.
5. Theresia Plamboyan Sianturi dan Kus Tri Andyarini (2020) metode yang digunakan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan analisis regresi linear beganda dengan pendepatan kuantitatif. Kemudian perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terkait objek yang diteliti dan periode waktu penelitian serta alat bantu dalam pengolahan data. Pada penelitian terdahulu ini objek penelitiannya adalah provinsi Sumatera Utara dengan periode waktu penelitian tahun 2014-2018 dan menggunakan *Eviews* 8 dalam pengolahan data, sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah provinsi Kalimantan Barat dengan rentang waktu penelitian dari tahun 2017-2021 dan menggunakan *E-views* versi 9 dalam alat pengolahan data.

6. Yulianus Lisa dkk. (2017) metode yang digunakan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan analisis regresi linear beganda dengan pendepatan kuantitatif. Kemudian perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terkait objek yang diteliti dan alat bantu dalam pengolahan data. Pada penelitian terdahulu ini objek penelitiannya adalah provinsi Kota Semarang dan menggunakan SPSS versi 22 dalam pengolahan data, sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah provinsi Kalimantan Barat dan menggunakan *E-views* versi 9 dalam alat pengolahan data.
7. Alvira Rahmi Syafitri dan Efendri (2020) metode yang digunakan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan analisis regresi linear beganda dengan pendepatan kuantitatif. Kemudian perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terkait objek yang diteliti dan periode waktu penelitian serta alat bantu dalam pengolahan data. Pada penelitian terdahulu ini objek penelitiannya adalah 400 pemerintahan kabupaten/kota pada rentang periode tahun 2014 hingga 2019 dan menggunakan STATA versi 16 dalam pengolahan data, sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah provinsi Kalimantan Barat dengan rentang waktu penelitian dari tahun 2017-2021 dan menggunakan *E-views* versi 9 dalam alat pengolahan data.
8. Bobby Andi Irawan (2016) metode yang digunakan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan analisis regresi linear beganda dengan pendepatan kuantitatif. Kemudian perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terkait objek yang diteliti dan periode waktu penelitian serta alat bantu dalam pengolahan data. Pada penelitian terdahulu ini objek penelitiannya adalah Provinsi se Indonesia dalam periode tahun 2013 hingga 2014 dan menggunakan STATA versi 15 dalam pengolahan data, sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah provinsi Kalimantan Barat dengan rentang waktu penelitian dari tahun 2017-2021 dan menggunakan *E-views* versi 9 dalam alat pengolahan data.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Belanja Modal**

Menurut Nuarisa (2013) belanja modal dimaknai sebagai bentuk pengeluaran anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk mendapatkan aset tetap ataupun aset lainnya yang tentunya memberikan manfaat keberlanjutan bagi masyarakat daerah dalam satu masa periode. Selanjutnya menurut Alvira Rahmi Syafitri dkk. (2020) menjelaskan bahwa pada dasarnya kehadiran dari belanja modal ini biasa digunakan untuk pengeluaran pemerintah daerah dengan tujuan untuk membeli keperluan pemerintahan daerah ataupun melakukan pembangunan sehingga menghasilkan nilai aset pemerintah daerah tersebut. Hal ini pun semakin dipertegas dengan munculnya sebuah aturan yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Dari pandangan yang disampaikan di atas maka dapat dilihat bahwa kehadiran dari belanja modal memiliki sifat yang bermanfaat untuk menambahkan nilai aset pemerintah daerah yang kemudian kehadirannya dapat dimanfaatkan secara meluas bagi masyarakat daerah tersebut.

#### **2.2.1.1 Kriteria Belanja Modal**

Adapun kriteria belanja modal menurut Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 adalah sebagai berikut.

1. Dengan adanya belanja modal tentunya akan mengakibatkan terjadinya pengeluaran yang akan memberikan aset bagi pemerintah daerah.
2. Terdapat kegiatan pengeluaran yang mampu melebihi kapasitas aset yang dimiliki.
3. Munculnya pengadaan aset akan tetap dilakukan namun tujuannya bukan untuk dilakukan sistem jual beli.
4. Tingkatan besaran pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh sebuah aset akan berkaitan secara langsung terkait dengan kualitas maupun kuantitas yang dimiliki aset tersebut yang tentunya semakin bertambah.
5. Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada dasarnya harus memenuhi batas minimal untuk memenuhi kebutuhan aset tersebut.

#### **2.2.1.2 Jenis-Jenis Belanja Modal**

Menurut Halim (2008) yang ada beberapa jenis kategori yang dimiliki oleh belanja modal yaitu.

1. Belanja yang dilakukan untuk modal tanah daerah
2. Belanja untuk peralatan dan mesin yang dibutuhkan
3. Belanja untuk keperluan gedung serta bangunan
4. Belanja yang berkaitan dengan pembangunan jalan, irigasi ataupun jaringan lainnya
5. Serta belanja keperluan aset tetap lainnya.

### **2.2.1.3 Ciri-Ciri Belanja Modal**

Menurut Halim (2008) ciri-ciri yang ada dalam belanja modal yaitu sebagai berikut.

1. Memiliki wujud yang nyata
2. Bersifat untuk menambahkan nilai
3. Proses penambahannya memiliki manfaat yang berkepanjangan
4. Memiliki nilai yang relatif terhadap material yang dibutuhkan.

### **2.2.1.4 Kebijakan Belanja Modal**

Menurut Halim (2008) adapun beberapa kebijakan belanja modal yaitu sebagai berikut.

1. Proses dana yang digunakan untuk infrastruktur dan juga sarana prasarana daerah diimplementasikan kepada pemerintahan daerah yang tentunya bersumber dari APBN.
2. Dilakukannya kegiatan pemeliharaan secara berkala dengan tujuan untuk meningkatkan serta membangun jaringan irigasi yang semakin baik
3. Dilakukannya penyempurnaan secara fisik terhadap jaringan penyebaran sistem air bersih, limbah, sampah hingga pada layanan kesehatan yang mudah bagi masyarakat
4. Memiliki serta menyediakan sarana prasarana alat transportasi bagi pelabuhan daerah
5. Memiliki sarana prasarana sistem informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
6. Menyediakan berbagai alat sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pemerintahan daerah.

## **2.2.2 Pendapatan Asli Daerah**

### **2.2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Muhammad Safar Nasir (2019) PAD merupakan kegiatan penerimaan yang bersumber dari pendapatan daerah yang diperoleh dari berbagai aspek yang ada di daerah. Kemudian Menurut BPS PAD adalah pendanaan yang berasal dari sumber lokal seperti pajak daerah, retribusi daerah, potongan pendapatan BUMD, iuran keagenan, dan bentuk pendapatan lainnya. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur terkait dengan Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah tepatnya pada pasal 1 ayat 18 menyatakan secara tegas dan lugas bahwasanya kehadiran dari PAD dimaknai sebagai kegiatan perolehan pendapatan yang dimiliki oleh daerah yang berlandaskan pada aturan daerah dan juga aturan pusat yang berlaku.

Menurut Muhammad Safar Nasir (2019) ada beberapa sumber PAD yang dimiliki oleh suatu daerah yaitu.

1. Pajak yang bersumber dari daerah
2. Berlakunya retribusi yang ada di daerah
3. Proses pelaksanaan pengelolaan kekayaan daerah
4. Pendapatan lainnya.

### **2.2.2.2 Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Rudy Badrudin (2011) jenis-jenis sumber PAD adalah sebagai berikut.

#### **1. Pajak Daerah**

Pajak pada dasarnya memiliki makna sebagai salah satu unsur pemasukan suatu negara. Dalam implementasinya tidak hanya menjadi pemasukan negara saja, namun juga menjadi pemasukan daerah. Pajak diperoleh dari pungutan yang dilakukan kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan kontribusi masyarakat terhadap pembangunan daerah.

#### **2. Retribusi Daerah**

Kehadiran dari retribusi daerah pada dasarnya dimaknai sebagai salah satu komponen yang berhubungan dengan pemungutan terhadap suatu usaha jasa. Tak



hanya itu saja, retribusi juga dilakukan untuk memberikan izin yang disediakan oleh pihak pemerintah.

### 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Komponen selanjutnya adalah terkait dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu komponen yang dimiliki oleh daerah yang termasuk ke dalam penerimaan daerah.

## 2.2.3 Dana Alokasi Umum

### 2.2.3.1 Pengertian Dana Alokasi Umum

Menurut DJKP bahwa DAU adalah dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang bersumber dari telah dirancang dalam APBN dengan tujuan untuk mampu membiayai kebutuhan daerah. Kemudian dalam aturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa DAU adalah dana yang diperoleh dari rancangan pendapatan APBN yang dipakai dengan tujuan untuk dilakukannya pemerataan daerah.

Berdasarkan pada penjelasan di atas maka pada dasarnya kehadiran dari DAU ini diberikan dengan landasan pada perolehan secara fiskal yang dimiliki oleh daerah tersebut. Tentunya hal ini dilakukan dikarenakan kebutuhan yang dimiliki oleh masing-masing daerah memiliki jumlah ataupun nilai yang berbeda-beda. Terdapat beberapa indikator yang mampu menentukan akan besaran DAU yang dikeluarkan untuk masing-masing daerah yaitu berkenaan dengan jumlah penduduk, tingkat IPM, tingkat atau jumlah ibu hamil dan anak, pendapatan yang dimiliki oleh daerah, dan lain sebagainya.

### 2.2.3.2 Formula dan Faktor–Faktor Penentuan Dana Alokasi Umum per Daerah

Untuk mengimplementasikan DAU kepada setiap daerah tentunya diperlukan sebuah sistem yang mampu menampung dan juga memiliki kemampuan untuk mengalokasikan dana tersebut. Seperti yang diketahui bahwa kehadiran dari DAU ini memiliki peranan yang cukup penting bagi pembangunan daerah oleh karenanya terdapat sebuah formulasi yang dirancang dengan berlandaskan pada alokasi dasar dan juga celah fiskal yang ada dalam DAU bagi masing-masing daerah. Pembagiannya adalah bagi pemerintahan kabupaten atau kota memperoleh besaran

DAU sebesar 10%. Untuk mengetahui nilai DAU tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang termuat dalam.

$$\text{DAU} = \text{CF} + \text{AD}$$

Keterangan:

DAU = DAU

CF = Celah Fiskal

AD = Alokasi Dasar

Dari rumus tersebut dapat dilihat bahwasanya kehadiran dari DAU dapat dipengaruhi oleh besaran alokasi dasar dan juga celah fiskal yang dimiliki oleh suatu daerah. Pada dasarnya kehadiran dari alokasi dasar diperoleh dari besaran data jumlah PNS yang ada di wilayah daerah. Tak hanya itu saja, alokasi dasar pun dapat dipengaruhi pula oleh besaran gaji yang dimiliki oleh PNS daerah yang berlandaskan pada kebijakan yang berlaku. Sedangkan celah fiskal merupakan komponen yang berkenaan dengan selisih yang dimiliki oleh kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal yang dimiliki oleh suatu daerah. Untuk mengetahui kebutuhan fiskal maka pada dasarnya terdapat beberapa komponen atau indikator yang dapat menentukannya yaitu:

1. Jumlah atau besaran penduduk yang ada di suatu wilayah
2. Indeks kemahalan konstruksi
3. Indeks pembangunan manusia, dan
4. Produk Domestik Regional Bruto per kapita yang dimiliki oleh daerah.

## **2.2.4 Dana Alokasi Khusus**

### **2.2.4.1 Pengertian Dana Alokasi Khusus**

DAK pada dasarnya dimaknai sebagai salah satu komponen yang dimiliki oleh daerah yang mana dalam pelaksanaannya termasuk ke dalam sumber pendapatan negara yang kemudian dibagikan atau dialokasikan kepada pihak daerah untuk kemudian dimanfaatkan bagi kegiatan khusus yang dilakukan oleh daerah. Tentunya dalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan termasuk juga dalam ketentuan atau regulasi yang diatur di dalamnya.

#### **2.2.4.2 Faktor-Faktor Penentu Dana Alokasi Khusus**

DAK nasional ditetapkan dalam APBN, sesuai dengan kemampuan APBN. Apabila dikaji secara mendalam maka pada dasarnya pelaksanaan kegiatan pengalokasian dana DAK dilakukan melalui dua tahapan yaitu sebagai berikut.

1. Dilakukannya berdasarkan pada penentuan daerah yang akan menerima DAK
2. Dilakukannya besaran alokasi yang disesuaikan berdasarkan pada DAK tiap-tiap daerah.

#### **2.2.5 Hubungan Keuangan Pusat–Daerah**

Hubungan yang terjalin di antara keuangan pusat dan daerah pada dasarnya bukanlah konsepsi yang sederhana. Pemerintah pusat akan melimpahkan kegiatan keuangan kepada pihak daerah untuk kemudian dikelola sehingga memperoleh PAD yang baik dan dapat digunakan secara merata bagi kebutuhan masyarakat daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah dan pusat sama-sama bertujuan guna memberikan kemudahan bagi penyelenggara pemerintah dalam melaksanakan fungsi layanan publik bagi masyarakat daerah yang tentunya memadai dan sesuai dengan standar yang berlaku serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

### **2.3 Pengaruh Antara Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen**

Pada dasarnya dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua variabel yang dijadikan sebagai landasan dalam penelitian. Variabel tersebut adalah variabel bebas dan juga variabel terikat yang tentunya memiliki kegunaan dan juga konsepsi yang berbeda-beda. Kemudian dalam penelitian ini peneliti menggunakan belanja modal sebagai variabel bebas. Sedangkan untuk variabel independen yang digunakan adalah PAD, DAU dan juga DAK. Untuk lebih jelas berikut akan disampaikan terkait dengan hubungan yang dimiliki oleh masing-masing variabel tersebut sebagai berikut.

#### **2.3.1 Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal**

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. Pendapatan asli daerah diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan

penerimaan daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum pendapatan pengeluaran.

Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan pendapatan asli daerah yang diterima. Pendapatan asli daerah ini digunakan oleh pemerintah daerah salah satunya untuk pembiayaan atas belanja daerah, maka pemerintah daerah seoptimal mungkin berusaha menggunakan segala potensi daerah yang dimilikinya untuk memperoleh peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan adanya peningkatan dari pendapatan asli daerah tentunya dapat berpengaruh terhadap belanja modal.

### **2.3.2 Hubungan Antara Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal**

Menurut Kesit Bambang Prakosa (2004) Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Hal ini berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Transfer ini cukup signifikan sehingga pemerintah daerah dapat menggunakannya untuk member pelayanan publik yang lebih baik.

Dana alokasi umum dapat dikategorikan sebagai transfer tak bersyarat atau *block grant* yang merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintah yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran tertentu. Tujuan dari penggunaan dana alokasi umum ini adalah untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar pada masyarakat. Jadi semakin besar dana alokasi umum yang diterima oleh pemerintah daerah maka dapat menyebabkan semakin besar pula kegiatan belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

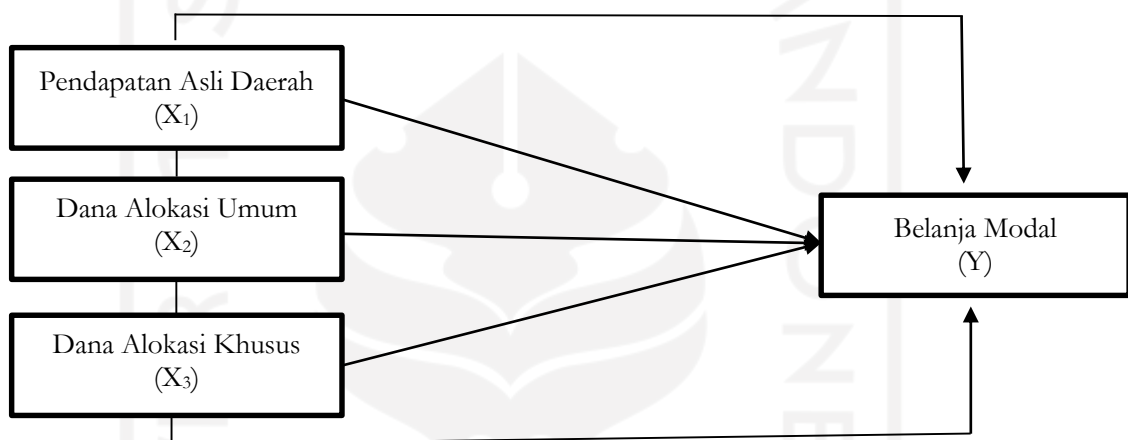
### **2.3.3 Hubungan Antara Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal**

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan dana alokasi khusus diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian dana alokasi khusus diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian

anggaran belanja modal karena dana alokasi khusus cenderung akan menambah asset tetap yang dimiliki oleh pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Berdasarkan hasil penelitian di atas yaitu semakin besar dana alokasi khusus maka dapat menyebabkan semakin besar pula kegiatan belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

#### 2.4 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian

Kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut.



**Gambar 2.1** Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan di atas maka dapat dibentuk hipotesis untuk penelitian sebagai berikut.

1. H<sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.
2. H<sub>2</sub> : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.
3. H<sub>3</sub> : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.
4. H<sub>4</sub> : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kausal. Menurut Sugiyono (2019) penelitian kausal merupakan suatu penelitian yang memiliki hubungan yang bersifat sebab akibat. Kemudian dalam penelitian ini sumber data yang digunakan peneliti adalah sumber data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas berbagai sumber bacaan seperti buku, jurnal, dan lain sebagainya yang mampu memberikan manfaat bagi referensi penelitian (Sugiyono, 2019).

#### **3.2 Definisi Variabel Operasional**

Kemudian untuk lebih memperjelas terkait definisi masing-masing variabel maka berikut beberapa komponen variabel operasional yang digunakan.

##### **1. Variabel Dependen**

Menurut Sugiyono (2019) variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah belanja modal.

##### **a. Belanja Modal**

Menurut Badan Pusat Statistik (2017) belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Kemudian belanja modal dalam penelitian ini satuan ukurnya adalah juta rupiah dan sumber data ini diambil dari *website* Badan Pusat Statistik (BPS).

##### **2. Variabel Independen**

Menurut Sugiyono (2019) variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini berupa variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

##### **a. Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Badan Pusat Statistik (2017) pendapatan asli daerah ialah penerimaan yang berasal dari sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah,

retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas, dan penerimaan lain-lain ukurnya adalah juta rupiah dan sumber data ini diambil dari *website* Badan Pusat Statistik (BPS).

#### b. Dana Alokasi Umum

Menurut Badan Pusat Statistik (2017) dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Kemudian dana alokasi umum dalam penelitian ini satuan ukurnya adalah juta rupiah dan sumber data ini diambil dari *website* Badan Pusat Statistik (BPS).

#### c. Dana Alokasi Khusus

Menurut Badan Pusat Statistik (2017) dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.. Kemudian dana alokasi khusus dalam penelitian ini satuan ukurnya adalah juta rupiah dan sumber data ini diambil dari *website* Badan Pusat Statistik (BPS).

### 3.3 Metode Analisis Data

#### 3.3.1 Analisis Deskriptif

Pada dasarnya penggunaan dari analisis deskriptif ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan terkait dengan aspek yang dimiliki oleh suatu gambar atau objek yang digunakan dalam penelitian. Hal ini penting adanya untuk mengkaji suatu objek penelitian secara mendalam (Ghozali, 2013).

#### 3.3.2 Analisis Regresi Data Panel

##### 3.3.2.1 *Common Effect Model*

*Common Effect* adalah salah satu perhitungan yang dilakukan dengan tujuan untuk menggabungkan data yang dimiliki oleh masing-masing variabel tanpa melihat adanya perbedaan yang dimiliki oleh waktu dan antar individu. Perhitungan dengan menggunakan model ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$Y_{it} = \alpha + X_{it}\beta + e_{it}$$

### 3.3.2.2 *Fixed Effect Model*

Metode ini digunakan untuk mengetahui dan menguji terkait dengan nilai koefisien yang dimiliki oleh variabel yang haruslah sama. Untuk memudahkan perhitungan ini diperlukan sebuah rumus yang dapat diaplikasikan dalam penelitian yaitu sebagai berikut.

$$Y_{it} = \alpha_i + \sum_{k=1}^p \beta_k X_{ik} + \epsilon_{it}$$

### 3.3.2.3 *Random Effect Model*

*Random effect* dimaknai sebagai salah satu bagian dari pelaksanaan penelitian yang berfokus mengkaji nilai yang ada di masing-masing variabel. Adapun beberapa kelemahan yang dimiliki oleh perhitungan ini adalah variabel yang digunakan adalah variabel semu. Hal ini menjadikan lahirnya ketidakpastian. Untuk mengkaji nilai perhitungan ini terdapat beberapa model yang digunakan yaitu ECM dan GLS dengan pengujian yang dilakukan dengan menggunakan uji *chow*, pengujian *hausman*, dan juga pengujian *lagrange multiplier*.

$$Y_{it} = \beta_0 + \sum_{k=1}^p \beta_k X_{ik} + \mu_i + \epsilon_{it}$$

## 3.3.3 Uji Asumsi Klasik

### 3.3.3.1 Uji Normalitas

Apabila suatu penelitian memiliki jumlah sampel yang kecil dan terbatas (kurang dari 100) data pengamatan, maka asumsi normalitas menjadi hal yang penting, karena akan membantu kita untuk menggunakan uji statistik T, F, dan  $R^2$  untuk model regresi. Namun apabila observasi penelitian yang besar (lebih dari 100), maka kita dapat melonggarkan asumsi normalitas, hal ini dikarenakan dalam penelitian yang memiliki sampel lebih dari 100 memiliki distribusi T, F dan  $R^2$  yang didasarkan pada asumsi *error term* secara normal dapat didistribusikan secara valid (Gujarati dan Porter, 2009).

### 3.3.3.2 Uji Autokorelasi

Menurut Agus Widarjono (2017), menyatakan bahwa pengujian autokorelasi pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkatan keterkaitan yang dimiliki oleh masing-masing variabel.



$H_0$  : Tidak terjadi gejala autokorelasi

$H_1$  : Terjadi gejala autokorelasi.

### 3.3.3.3 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas pada dasarnya dimaknai sebagai salah satu bagian dalam pengujian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui terkait dengan besaran model regresi yang dimiliki oleh masing-masing variabel yang digunakan dalam sebuah penelitian (Ghozali, 2013). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi ini digunakan *matriks correlation* untuk melihat apakah ada gejala multikolinieritas, jika nilai korelasi antar variabel bebas lebih dari 0.8 maka dapat dikatakan terdapat masalah multikolinieritas (Sugiyono, 2019).

### 3.3.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2013). Suatu model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak terjadi heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut.

1. Jika  $p\text{-value} < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang berarti terjadi gejala heteroskedastisitas.
2. Jika  $p\text{-value} > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak yang berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

## 3.3.4 Pengujian Hipotesis

### 3.3.4.1 Uji Parsial (Uji T)

Diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian dapat dilakukan dengan dasar analisis dengan menggunakan pengujian parsial sebagai berikut.

1. Apabila nilai signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Apabila nilai signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, yang artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

### 3.3.4.2 Uji Simultan (Uji F)

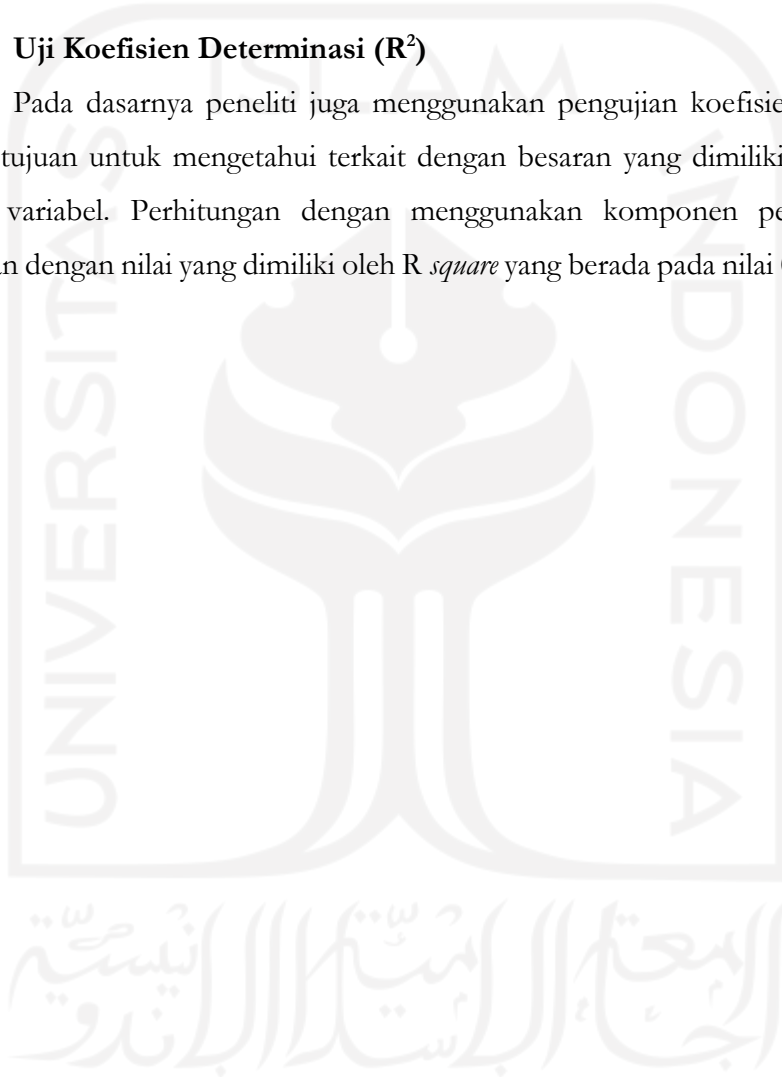
Menurut Ghozali, (2013), cara melakukan uji f adalah sebagai berikut.

Kriteria Penerimaan Hipotesis.

1. Jika nilai signifikan  $<$  dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
2. Jika nilai signifikan  $>$  dari 0,05, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

### 3.3.4.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Pada dasarnya peneliti juga menggunakan pengujian koefisien determinasi dengan tujuan untuk mengetahui terkait dengan besaran yang dimiliki oleh masing-masing variabel. Perhitungan dengan menggunakan komponen perhitungan ini dilakukan dengan nilai yang dimiliki oleh *R square* yang berada pada nilai 0-1 (Sugiyono, 2019).



## BAB IV

### HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Analisis

##### 4.1.1 Analisis Deskriptif

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini pada dasarnya menggunakan analisis deskriptif. Seperti yang disampaikan oleh para ahli bahwasanya analisis yang berfokus pada deskriptif pada intinya akan menjelaskan secara terperinci terkait dengan objek penelitian yang diteliti. Dalam hal ini terdapat beberapa hasil perhitungan yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut.

**Tabel 4.1** Statistik Deskriptif

	BM	PAD	DAU	DAK
Mean	314.2365	104.0942	686.8435	6612.500
Maximum	670.2370	496.1120	1.215197	7935.000
Minimum	137.8470	19.41400	415.8760	6009.000
Std. Dev.	103.5889	97.46600	167.4149	398.9251
Jarque-Bera	7.508474	231.6457	4.737713	83.13125
Probability	0.023418	0.000000	0.093588	0.000000
Sum	21996.56	7286.593	44644.82	462875.0
Sum Sq. Dev.	740415.8	655473.8	1793775.	10980748
Observations	70	70	70	70

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2022

Berdasarkan hasil program pengolahan data di atas, maka diperoleh hasil sebagai berikut.

1. Berdasarkan tabel 4.1 ditunjukkan bahwa jumlah data dalam penelitian ini berjumlah 70 untuk variabel PAD atau  $X_1$  memiliki nilai rata-rata sebesar 104,0942 atau 104.094.200 rupiah, kemudian pada nilai maksimum sebesar 496,1120 atau 496.112.000 rupiah terdapat pada daerah Kota Pontianak pada tahun 2020 dan nilai minimum sebesar 19,41400 atau 19.414.000 rupiah terdapat pada daerah Kabupaten

Kayong Utara pada tahun 2020. Serta memiliki nilai standar deviasi sebesar 97,46600 atau 97.466.000 rupiah. Menurut Ghozali (2013) uji deskriptif dikatakan baik apabila nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari nilai standar deviasi. Diketahui bahwa nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari pada nilai standar deviasi yaitu  $104,0942 > 97,46600$ . Kemudian dapat disimpulkan bahwa pada variabel PAD telah memenuhi syarat uji deskriptif.

2. Berdasarkan tabel 4.1 ditunjukkan bahwa jumlah data dalam penelitian ini berjumlah 70 untuk variabel DAU atau  $X_2$  memiliki nilai rata-rata sebesar 686,8435 atau 686.843.500 rupiah, kemudian pada nilai maksimum sebesar 1,215197 atau 1.215.197.000 rupiah terdapat pada daerah Kabupaten Ketapang pada tahun 2019 dan nilai minimum sebesar 415,8760 atau 415.876.000 rupiah terdapat pada daerah Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2017. Serta memiliki nilai standar deviasi sebesar 167,4149 atau 167.414.900 rupiah. Menurut Ghozali (2013) uji deskriptif dikatakan baik apabila nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari nilai standar deviasi. Diketahui bahwa nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari pada nilai standar deviasi yaitu  $686,8435 > 167,4149$ . Kemudian dapat disimpulkan bahwa pada variabel DAU telah memenuhi syarat uji deskriptif.
3. Berdasarkan tabel 4.1 ditunjukkan bahwa jumlah data dalam penelitian ini berjumlah 70 untuk variabel DAK atau  $X_3$  memiliki nilai rata-rata sebesar 6612,500 atau 66.125.000 rupiah, kemudian pada nilai maksimum sebesar 7935,000 atau 79.350.000 rupiah terdapat pada daerah Kota Pontianak pada tahun 2021 dan nilai minimum sebesar 6009,000 atau 60.090.000 rupiah terdapat pada daerah Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2017. Serta memiliki nilai standar deviasi sebesar 398,9251 atau 39.892.510 rupiah. Menurut Ghozali (2013) uji deskriptif dikatakan baik apabila nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari nilai standar deviasi. Diketahui bahwa nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari pada nilai standar deviasi yaitu  $6612,500 > 398,9251$ . Kemudian dapat disimpulkan bahwa pada variabel DAK telah memenuhi syarat uji deskriptif.
4. Berdasarkan tabel 4.1 ditunjukkan bahwa jumlah data dalam penelitian ini berjumlah 70 untuk variabel Belanja Modal (BM) atau Y memiliki nilai rata-rata sebesar 314,2365 atau 314.236.500 rupiah, kemudian pada nilai maksimum sebesar 670,2370 atau 670.237.000 rupiah terdapat pada daerah Kabupaten Ketapang pada

tahun 2021 dan nilai minimum sebesar 137,8470 atau 137.847.000 rupiah terdapat pada daerah Kabupaten Mempawah pada tahun 2020. Serta memiliki nilai standar deviasi sebesar 103,5889 atau 103.588.900 rupiah. Menurut Ghozali (2013) uji deskriptif dikatakan baik apabila nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari nilai standar deviasi. Diketahui bahwa nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari pada nilai standar deviasi yaitu  $314,2365 > 103,5889$ . Dapat disimpulkan bahwa pada variabel BM telah memenuhi syarat uji deskriptif.

#### 4.1.2 Regresi Data Panel

##### 4.1.2.1 Metode Estimasi

Dalam menentukan model estimasi mana yang akan dipilih, untuk itu harus mengikuti beberapa metode estimasi sebagai berikut.

**Tabel 4.2** Model Estimasi

Variabel	CEM		FEM		REM	
	Coefficient	Sig	Coefficient	Sig	Coefficient	Sig
C	151.6265	0.6658	<b>1990.386</b>	<b>0.0085</b>	216.5281	0.5846
PAD	0.405723	0.0768	<b>0.182140</b>	<b>0.6638</b>	0.395228	0.1250
DAU	-0.244163	0.0000	<b>1.164725</b>	<b>0.0018</b>	0.251701	0.0004
DAK	-0.009283	0.8649	<b>-0.379212</b>	<b>0.0059</b>	-0.019709	0.7495
R <sup>2</sup>		0.466365		<b>0.695850</b>		0.292575
Adj R <sup>2</sup>		0.440121		<b>0.602743</b>		0.257784
F-Statistic	17.77012		<b>7.473638</b>		1.780784	
Prob.		0.000000		<b>0.000000</b>		0.000092

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2022

##### 1. Uji *Chow*

Uji ini ditujukan untuk mengetahui apakah teknik *common effect model* atau model *fixed effect model* yang paling tepat untuk estimasi data. Dari kedua teknik atau

pendekatan tersebut yakni teknik *common effect model* dan teknik *fixed effect model*, maka diperoleh uji *chow* yang dipaparkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.3** Hasil Uji *Chow*

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.080919	(12,49)	0.0026
Cross-section Chi-square	36.542357	14	0.0003

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2022.

Dari tabel 4.3 di atas diketahui bahwa nilai *probability* pada kolom *cross-section chi-square* adalah 0,0003 lebih kecil dari 0,05. Kemudian karena nilai *p-value* lebih kecil 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak, maka pengujian yang terpilih adalah *fixed effect model*, yang kemudian dilakukan uji *hausman* untuk memilih apakah model *fixed effect model* ataukah model *random effect model* yang terbaik dan tidak perlu melakukan uji *lagrange multiplier*.

## 2. Uji Hausman

Uji ini peneliti gunakan untuk ditunjukkan dalam mengetahui apakah teknik *random effect model* atau model *fixed effect model* yang paling tepat untuk estimasi data. Dari kedua teknik atau pendekatan di atas yakni teknik *random effect model* dan teknik *fixed effect model*, maka diperoleh uji *hausman* yang dipaparkan pada tabel berikut.

**Tabel 4.4** Hasil Uji *Hausman*

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	14.576141	3	0.0022

Sumber: Data Sukender Diolah Tahun 2022

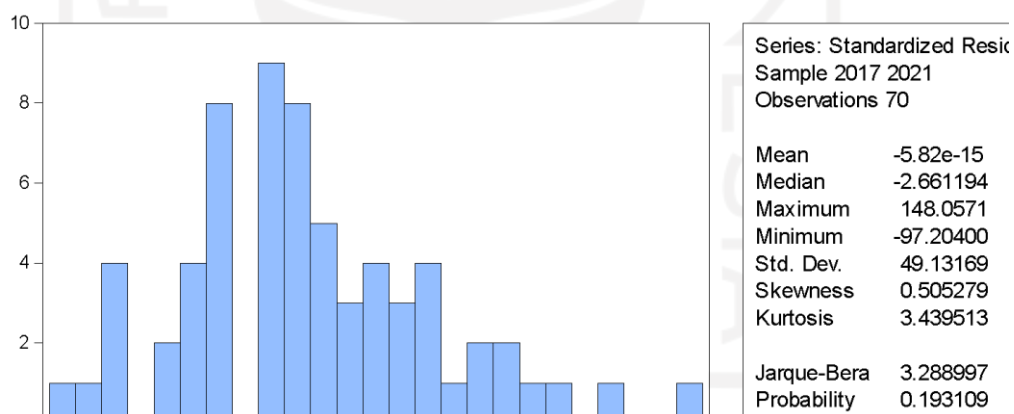
Dari tabel 4.4 di atas diketahui bahwa nilai probabiliti pada kolom *cross-section random* adalah 0,0022 lebih kecil dari 0,05. Kemudian karena nilai *p-value* lebih kecil 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak, maka pengujian yang terpilih adalah *fixed effect model*.

Dari paparan data dan beberapa analisis di atas terkait pemelihan model CEM, FEM, REM. Peneliti menggunakan metode uji *chow* dan uji *hausman*, maka peneliti dapat menyimpulkan model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *fixed effect model* (FEM).

### 4.1.3 Uji Asumsi Klasik

#### 4.1.3.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas juga digunakan oleh peneliti untuk mengkaji data yang telah diperoleh. Data penelitian dapat dikatakan normal apabila nilai probabilitasnya berada di atas 5%. Hasil uji normalitas dipaparkan pada gambar 4.1 di bawah ini adalah sebagai berikut.



**Gambar 4.1** Hasil Uji Normalitas

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2022

Hasil uji normalitas pada gambar di atas menunjukkan bahwa uji *probability jarque-bera* memiliki nilai *probability* sebesar  $0,193109 > 0.05$  ( $\alpha$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa residualnya berdistribusi normal.

#### 4.1.3.2 Uji Autokorelasi

Menurut Widarjono (2017) autokorelasi berarti adanya korelasi antara observasi satu dengan observasi lainnya yang berlainan waktu. Untuk menguji ada atau

tidaknya gejala autokorelasi, dapat digunakan metode *durbin-watson* (DW test). Berikut hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut.

**Tabel 4.5** Hasil Uji Autokorelasi

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.695850	Mean dependent var	300.0559
Adjusted R-squared	0.602743	S.D. dependent var	89.08767
S.E. of regression	56.15050	Akaike info criterion	11.10369
Sum squared resid	154491.1	Schwarz criterion	11.63892
Log likelihood	-344.8699	Hannan-Quinn criter.	11.31487
F-statistic	7.473638	Durbin-Watson stat	2.203122
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2022

Keterangan:

$$DW = 2,203122$$

$$K = 4$$

$$\text{Jumlah observasi} = 70$$

$$dL = 1,4943$$

$$dU = 1,7351$$

$$4-dU = 4 - 1,7351 = 2,2081$$

$$= dU < dW < 4 - dU$$

$$= 1,7351 < 2,203122 < 2,2081$$

Berdasarkan perhitungan nilai autokorelasi di atas dapat kita simpulkan bahwa pada model penelitian ini tidak terjadi masalah autokorelasi.

#### 4.1.3.3 Uji Multikolinearitas

Pada dasarnya pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hasil dari perhitungan model regresi yang dimiliki oleh masing-masing variabel. Dasar pengambilan keputusannya jika nilai korelasi antar variabel bebas lebih dari 0,8 maka dapat dikatakan terdapat masalah multikolonieritas (Saraswati, 2017). Hasil uji multikolinearitas disajikan pada tabel sebagai berikut.



**Tabel 4.6** Hasil Uji Multikolinearitas

	PAD	DAU	DAK
PAD	1.000000	0.192946	0.922481
DAU	0.192946	1.000000	0.075283
DAK	0.922481	0.075283	1.000000

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2022

Berdasarkan pada tabel 4.6 di atas, terlihat bahwa hasil perhitungan menunjukkan nilai korelasi tiap-tiap variabel dependen PAD, DAU, dan DAK memiliki nilai kurang dari 0.8, artinya tidak terdapat masalah multikolinearitas pada variabel bebasnya.

#### 4.1.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016) uji heteroskedastisitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah pada model regresi terdapat kesamaan varian dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Berikut hasil uji heteroskedastisitas berdasarkan uji *Glejser*.

**Tabel 4.7** Hasil Uji *Glejser*

Heteroskedasticity Test: Glejser			
F-statistic	0.792498	Prob. F(8,82)	0.4782
Obs*R-squared	5.680161	Prob. Chi-Square (5)	0.5776
Scaled explained SS	8.817190	Prob. Chi-Square (5)	0.2660

Sumber: Data Sekunder Diolah 2022

Berdasarkan dengan penelitian di atas maka pada dasarnya dapat dilihat bahwa data di atas menunjukkan nilai *real* atau nyata yang digunakan adalah sebesar 5%. Dengan nilai tersebut menghasilkan jumlah Prob. F maka perolehan data tersebut

berdasarkan  $0.4782 > 0.05$  yang pada dasarnya data tersebut menyatakan hasil regresi tidak memiliki gejala terhadap nilai heteroskedastisitas.

#### 4.1.4 Pengujian Hipotesis

##### 4.1.4.1 Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013).  $H_a$  diterima apabila nilai prob.  $< 0,05$ .

**Tabel 4.8** Hasil Uji Parsial (Uji T)

Dependent Variable: BM				
Method: Panel Least Squares				
Date: 07/18/22 Time: 20:29				
Sample: 2017 2021				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 14				
Total panel (balanced) observations: 70				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1990.386	725.3544	2.744018	0.0085
PAD	0.182140	0.416500	0.437311	0.6638
DAU	1.164725	0.352792	3.301451	0.0018
DAK	0.379212	0.131591	2.881745	0.0059
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.695850	Mean dependent var	300.0559	
Adjusted R-squared	0.602743	S.D. dependent var	89.08767	
S.E. of regression	56.15050	Akaike info criterion	11.10369	
Sum squared resid	154491.1	Schwarz criterion	11.63892	
Log likelihood	-344.8699	Hannan-Quinn criter.	11.31487	
F-statistic	7.473638	Durbin-Watson stat	2.203122	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2022

Berdasarkan pada tabel 4.8 di atas diperoleh nilai sinifikansi dari setiap variabel independen dalam penelitian ini. Nilai signifikansi dari setiap variabel independen akan dibandingkan dengan tingkat kepercayaan  $\alpha = 0,05$ . Analisis regresi linier berganda digunakan untuk melihat perubahan variabel dependen berdasarkan lebih dari satu variabel independen dalam suatu persamaan (Ghozali, 2013). Persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

$$Y = 1990,386 + 0,182140 X_1 + 1,164725 X_2 + 0,379212 X_3$$

Keterangan:

- Y : Belanja Modal  
 X<sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah  
 X<sub>2</sub> : Dana Alokasi Umum  
 X<sub>3</sub> : Dana Alokasi Khusus

1. Uji untuk konstanta dengan alfa 0,05

Dengan melihat probabilitas konstanta dengan tingkat signifikansi yakni ( $0,0085 < 0,05$ ) sehinggah H<sub>0</sub> ditolak dan signifikan. Konstanta ( $\alpha$ ) = 1990,386 artinya apabila variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus sebesar 0, maka Belanja Modal sebesar 1990,386 atau Rp 1.990.386.000.

2. Uji t dengan PAD dengan alfa 0.05

Variabel Pendapatan Asli Daerah atau yang diproksikan dengan X<sub>1</sub> memiliki nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikan yakni ( $0,6638 > 0,05$ ) sehingga H<sub>1</sub> ditolak atau H<sub>0</sub> diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

3. Uji t variabel DAU dengan alfa = 0.05

Variabel Dana Alokasi Umum atau yang diproksikan dengan X<sub>2</sub> memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikan yakni ( $0,0018 < 0,05$ ) sehingga H<sub>2</sub> diterima atau H<sub>0</sub> ditolak. Dari tabel 4.8 koefisien Dana Alokasi Umum = 1,164725 maka dapat disimpulkan bahwa variabel dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

#### 4. Uji t variabel DAK dengan alfa 0.05

Variabel Dana Alokasi Khusus atau yang diproksikan dengan  $X_3$  memiliki nilai probabilitas kurang dari tingkat signifikan yakni ( $0,0059 < 0,05$ ) sehingga  $H_3$  diterima atau  $H_0$  ditolak. Dari table 4.8 koefisien Dana Alokasi Khusus = 0,379212, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

#### 4.1.4.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (Sugiyono, 2019).  $H_a$  diterima apabila nilai prob.  $< 0,05$ .

**Tabel 4.9** Hasil Uji Simultan (Uji F)

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.695850	Mean dependent var	300.0559
Adjusted R-squared	0.602743	S.D. dependent var	89.08767
S.E. of regression	56.15050	Akaike info criterion	11.10369
Sum squared resid	154491.1	Schwarz criterion	11.63892
Log likelihood	-344.8699	Hannan-Quinn criter.	11.31487
F-statistic	7.473638	Durbin-Watson stat	2.203122
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2022

Berdasarkan pada data yang telah disajikan dalam tabel 4.9 maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal. Hal ini dibuktikan dengan nilai yang dimiliki menjadi  $0.000000 < 0.05$ .

#### 4.1.4.3 Uji Koefisien Determinasi (Uji $R^2$ )

Telah dilakukan pengujian dengan menggunakan Koefisien Determinasi yang pada dasarnya berupaya untuk mengukur besaran kemampuan yang dimiliki oleh suatu variabel bebas yang termuat dalam masing-masing variabel terikat. Berikut hasil pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti.

**Tabel 4.10** Hasil Uji Determinasi (Uji R<sup>2</sup>)

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.695850	Mean dependent var	300.0559
Adjusted R-squared	0.602743	S.D. dependent var	89.08767
S.E. of regression	56.15050	Akaike info criterion	11.10369
Sum squared resid	154491.1	Schwarz criterion	11.63892
Log likelihood	-344.8699	Hannan-Quinn criter.	11.31487
F-statistic	7.473638	Durbin-Watson stat	2.203122
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2022

Pada tabel 4.10 di atas menunjukkan nilai *R Square* 0,695850 menunjukkan nilai positif dan mendekati 1 yang artinya variabel bebas yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini mampu memengaruhi variabel terikat yaitu Belanja Modal dan memiliki kekuatan yang kuat sekitar 0,695850 atau sebesar 69,58%. Masih tersisa sekitar 30,42% faktor lain yang mampu memengaruhi belanja modal yang tidak diteliti oleh peneliti.

## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya terkait dengan PAD ini menyatakan bahwasanya PAD merupakan salah satu komponen yang penting dari penerimaan yang bersumber dari daerah yang diperoleh berdasarkan pada penghasilan pajak, retribusi, dan lain sebagainya (Nasir, 2019). Beberapa bagian yang termasuk ke dalam jenis PAD dalam penerapannya memiliki beberapa faktor lainnya yang saling memengaruhi satu dengan yang lainnya. Faktor tersebut salah satunya adalah kewajiban yang dimiliki oleh daerah untuk mampu memenuhi kebutuhan dan juga biaya pembangunan terhadap daerah tersebut.

Berdasarkan dari hasil Uji Parsial (Uji T) sebelumnya diketahui bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah atau yang diproksikan dengan  $X_1$  tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Artinya apabila terjadi peningkatan ataupun penurunan yang terjadi

pada Pendapatan Asli Daerah tidak akan berdampak pada Belanja Modal. Tidak berpengaruhnya antara Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal dijelaskan dalam *agency theory*, hubungan kontraktual antara agen (masyarakat) dan prinsipal (pemerintah) dalam konteks Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal, yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang dibiayai dari belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya, sedangkan belanja modal itu sendiri sumber pembiayaannya dari Pendapatan Asli Daerah.

Pada penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak signifikan dapat disebabkan karena adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak diikuti dengan peningkatan Belanja Modal. Berdasarkan hasil analisis terdapat beberapa daerah di Kabupaten atau Kota di Provinsi Kalimantan Barat, di mana Pendapatan Asli Daerah meningkat dari tahun 2017-2021 akan tetapi tidak diikuti dengan peningkatan Belanja Modal, misalnya pada Kabupaten Landak. Kabupaten Landak lebih mengutamakan belanja pegawai.

Menurut Yovita (2011) provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah yang besar cenderung tidak memiliki Belanja Modal yang besar. Hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja yang lain, seperti belanja rutin atau belanja operasional.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tituk Dyah Widajantie (2021) yang mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PAD dan DAU tidak berpengaruh terhadap belanja langsung sedangkan variabel DAK tidak berpengaruh terhadap belanja langsung.

#### **4.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal**

Menurut Nurchaida (2015) Dana Alokasi Umum atau yang lebih sering dikenal dengan DAU merupakan dana yang bersumber dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan atau meminimalisir terjadinya kesenjangan secara fiskal di antara masing-masing daerah. Tak hanya itu saja, kehadiran dari DAU juga bertujuan untuk memberikan kemandirian bagi pemerintah daerah untuk mengurus berbagai aspek dalam kedaerahan yang berlandaskan pada pelayanan terhadap masyarakat luas. Besaran DAU yang dimiliki

oleh masing-masing daerah tentunya berbeda-beda. Hal ini dikarenakan DAU dilandasi pada kegiatan potensial daerah yang diukur dengan kebutuhan yang diperlukan oleh tiap daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Mardiasmo, 2002).

Berdasarkan dari hasil Uji Parsial (Uji T) sebelumnya diketahui bahwa variabel dana alokasi umum atau yang diproksikan dengan  $X_2$  berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Koefisien DAU 1.164725 dapat diinterpretasikan apabila DAU terjadi peningkatan DAU sebesar Rp 1 juta maka akan meningkat belanja modal sebesar 1.164725 juta rupiah. Berpengaruhnya antara Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal dijelaskan bahwa dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Hal ini berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Transfer ini cukup signifikan sehingga pemerintah daerah dapat menggunakannya untuk member pelayanan publik yang lebih baik.

Dana Alokasi Umum (DAU) dapat dikategorikan sebagai transfer tak bersyarat atau *block grant* yang merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintah yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran tertentu. Tujuan dari penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) ini adalah untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar pada masyarakat. Berdasarkan dari hasil penelitian diatas yaitu semakin besar Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh pemerintah daerah maka dapat menyebabkan semakin besar pula kegiatan Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Kemudian dalam Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan PAD sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Penerimaan daerah tersebut dapat digunakan untuk membiayai segala kewajibannya dalam menjalankan pemerintahannya, termasuk untuk digunakan dalam meningkatkan infrastruktur daerah. Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap

pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Penghasilan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal dan sangat berperan sangat penting dalam kemajuan daerah itu sendiri. Secara otomatis dari pengalokasian Penghasilan Asli Daerah (PAD) akan diikuti raelisasi dari belanja modal yang akan membantu meningkatkan kinerja dari pelayanan publik tersebut.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh penelitian Theresia Plamboyan Sianturi dan Kus Tri Andyarini (2020) mengenai Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2014-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

#### **4.2.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal**

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwasanya kehadiran dari DAK memiliki banyak pandangan yang telah disampaikan oleh para ahli terkait dengan konsepsi DAK. Menurut DJKP, maka dapat dilihat bahwa DAK hadir sebagai salah satu sumber dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang nantinya akan diberikan kepada pihak daerah yang kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan dari hasil Uji Parsial (Uji T) sebelumnya diketahui bahwa variabel Dana Alokasi Khusus atau yang diproksikan dengan  $X_3$  berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Koefesien DAK 0.379212 dapat di interpretasikan apabila DAK terjadi peningkatann sebesar Rp 1 juta maka akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0.379212 juta rupiah. Artinya apabila terjadi peningkatan ataupun penurunan yang terjadi pada Dana Alokasi Khusus maka akan berdampak pada Belanja Modal. Berpengaruhnya hubungan antara dana alokasi khusus terhadap belanja modal dijelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus diarahkan pada kegiatan investasi



pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian Dana Alokasi Khusus diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran Belanja Modal karena Dana Alokasi Khusus cenderung akan menambah asset tetap yang dimiliki oleh pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Berdasarkan hasil penelitian di atas yaitu semakin besar Dana Alokasi Khusus maka dapat menyebabkan semakin besar pula kegiatan Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh penelitian Alvira Rahmi Syafitri dan Efendri (2020) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap belanja modal, Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap belanja modal, Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja modal, Pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi hubungan PAD terhadap belanja modal, Pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi hubungan DAU terhadap belanja modal, dan Pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi hubungan DAK terhadap belanja modal.

#### **4.2.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Secara Simultan Terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan dari hasil Uji Simultan (Uji F) sebelumnya diketahui bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal. Artinya apabila terjadi peningkatan ataupun penurunan yang terjadi pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus maka akan berdampak pada Belanja Modal. Berpengaruhnya hubungan antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal dijelaskan bahwa belanja modal yang tinggi tentunya banyak faktor yang melatarbelakangi hal tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi belanja modal adalah pendapatan asli daerah. Ketika pendapatan asli daerah tersebut mengalami peningkatan salah satunya dari sektor pemungutan pajak maka pendapatan

asli daerah tersebut akan dialokasikan kepada belanja modal dan akan berdampak pada besar atau kecilnya dari anggaran belanja modal tersebut.

Kemudian tidak hanya pendapatan asli daerah saja yang dapat mempengaruhi kegiatan belanja modal bantuan dana dari pemerintah juga mempunyai pengaruh yang besar dalam kegiatan belanja modal. Salah satu bantuan dari pemerintah pusat tersebut adalah dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus merupakan anggaran dana dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah yang bersumber dari dana APBN. Dalam menunjang kegiatan belanja modal di pemerintah daerah dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sangat berperan penting, karena jika hanya mengandalkan dari pendapatan asli daerah saja dana dari belanja modal akan kekurangan. Jadi dengan adanya pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus akan berdampak kepada besar atau kecilnya belanja modal bagi pemerintah daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh penelitian Imam Khulwani dkk. (2022) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada 4 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan periode 2016-2020.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di atas maka pada dasarnya terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut.

1. Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Artinya semakin tinggi atau rendah pendapatan asli daerah maka belanja modal tidak akan berdampak apapun
2. Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Artinya semakin tinggi dana alokasi umum maka belanja modal juga akan semakin meningkat dan sebaliknya.
3. Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Artinya semakin tinggi dana alokasi khusus maka belanja modal juga akan semakin meningkat dan sebaliknya.
4. Secara simultan terdapat pengaruh antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal.

#### **5.2 Implikasi**

Berdasarkan simpulan yang diuraikan di atas, dapat diberikan beberapa implikasi atau saran sebagai berikut.

1. Bagi pemerintah pusat sebaiknya memberikan program yang lebih banyak kepada pemerintah daerah agar dapat memajukan pemerintah daerah sehingga anggaran belanja modal dapat bertambah.
2. Bagi pemerintah daerah sebaiknya dapat membelanjakan anggaran dari pemerintah pusat sebaik mungkin guna memajukan pemerintahan daerah dan berdampak dalam mensejahterakan masyarakat yang ada di daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel lain, selain pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus sebagai faktor yang dapat mempengaruhi belanja

4. Bagi peneliti selanjutnya lebih memperpanjang waktu penelitian (lebih dari 5 tahun) dalam menguji faktor yang mempengaruhi belanja modal, sehingga dapat diketahui kecenderungan antar waktu penelitian.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abid M, Sri Rahayu, Wiwin Aminah. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2015). *eProceedings of Management*. 2014;5(1). Accessed September 5, 2022.
- Agus Widarjono, P. 2017. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Andriawan, Bobby. 2017. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) , Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dan Dana Bagi Hasil (Dbh) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Provinsi Di Indonesia." . *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 53(9): 21–25.
- Badrudin, Rudy, and Mufidhatul Khasanah. "Pengaruh pendapatan dan belanja daerah terhadap pembangunan manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta." *Buletin Ekonomi* 9.1 (2011).
- Dana Alokasi Khusus (DAK)." 2022. *berkas.dpr.go.id*.
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)." 2022. *djpk.kemenkeu.go.id*. [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan#:~:text=Dana Alokasi Khusus \(DAK\)%2C,dan sesuai dengan prioritas nasional. \(June 18, 2022\).](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan#:~:text=Dana Alokasi Khusus (DAK)%2C,dan sesuai dengan prioritas nasional. (June 18, 2022).)
- Dana Alokasi Umum (DAU) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)." 2022. *djpk.kemenkeu.go.id*. [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan#:~:text=Dana Alokasi Umum \(DAU\)%2C,Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. \(June 17, 2022\).](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan#:~:text=Dana Alokasi Umum (DAU)%2C,Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (June 17, 2022).)
- Efendri, Alvira Rahmi Syafitri &. 2019. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia Periode 2014-2019)." *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank*. [Http://Repository.Stimart-Amni.Ac.Id/Id/Eprint/552](http://Repository.Stimart-Amni.Ac.Id/Id/Eprint/552).
- Ferdiansyah, Irfan, Dwi Risma Deviyanti, And Salmah Pattisahusiwa. 2018. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah." *Inovasi* 14(1): 44.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Gischa, Serafica. 2022. "Pendapatan Asli Daerah: Pengertian Dan Jenisnya." *Kompas.com*.<https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/04/212232369/pendapatan-asli-daerah-pengertian-dan-jenisnya?page=all> (June 17, 2022).
- Gujarati, D.N. & D.C. Porter, (2009), "Basic Econometrics", 5th edition, McGraw-Hill, New York, (terjemahan: Mardanugraha, dkk., 2010, Dasardasar Ekonometrika", Salemba Empat).
- <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-259.pdf> (June 17, 2022).
- <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-256.pdf> (June 18, 2022).
- Ibnu. 2021. "Belanja Modal Adalah: Pengertian, Jenis, Dan Cara Menghitungnya." *accurate.id*. <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/belanja-modal-adalah/> (June 15, 2022).
- Irawan, Bobby Andi, and Agus Endro Suwarno. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Provinsi Di Indonesia*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.
- Khulwani, Imam, Risal Rinofah, And Pristin Prima Sari. 2022. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Diy) Tahun 2016–2020." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4(4): 1050–68.
- Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Barat Mei 2022. Bi.go.id. Published 2022. Accessed September 5, 2022.
- Liana Dwi Astuti, Titik Mildawati. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*. 2019;8(10). Accessed September 5, 2022.
- Lisa, Yulianus, Priyagus, And Juliansyah Roy. 2017. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Serta Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia The Effect Of Original Regional Income And Balancing Funds On Direct Spending And Indirect Shopping And Econom." *Forum Ekonomi* 19(2): 162–73. [Http://Journal.Feb.Unmul.Ac.Id/Index.Php/Forumekonomi/Article//2123](http://Journal.Feb.Unmul.Ac.Id/Index.Php/Forumekonomi/Article//2123)
- Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi Yogyakarta

- Nasir, Muhammad Safar. "Analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah setelah satu dekadeotonomi daerah." *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 2.1 (2019): 30-45.
- Nissa Anggit Pratiwi. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*. 2019;3(2):105-120.
- Nira P, Ubaidillah U, Subeki A. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2008 - 2012 - Sriwijaya University Repository. *Unsriacid*. Published Online March 24, 2014.
- Pangestu p, Parassela, Meutia Riany, Elisabeth Paramita J.S, and Endah Sundaning K. 2019. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal." *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja* 4(4): 26–32.
- PER\_DIRJEN\_PBH No PER-33/PB/2008. Pajakku.com. Published 2022. Accessed September 5, 2022. [https://www.pajakku.com/tax-guide/7530/PER\\_DIRJEN\\_PBH/PER-33/PB/2008](https://www.pajakku.com/tax-guide/7530/PER_DIRJEN_PBH/PER-33/PB/2008).
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pusat Statistik (BPS).” 2022. *www.bps.go.id*. [https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah\\_page=28&Istilah\\_sort=keyword\\_ind.desc#:~:text=Pendapatan asli daerah adalah penerimaan,%20dan penerimaan lain-lain.](https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_page=28&Istilah_sort=keyword_ind.desc#:~:text=Pendapatan%20asli%20daerah%20adalah%20penerimaan,%20dan%20penerimaan%20lain-lain.) (June 16, 2022).
- PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan [JDIH BPK RI]. Bpk.go.id. Published 2017. Accessed September 5, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>.
- Prakosa, Kesit Bambang. "Analisis pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap prediksi belanja daerah (studi empirik di wilayah propinsi Jawa Tengah dan DIY)." *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 8.2 (2004).
- Riadi, Muchlisin. 2020. "Belanja Modal (Pengertian, Kriteria, Jenis Dan Kebijakan)." *Kajianpustaka.com*. <https://www.kajianpustaka.com/2020/11/belanja-modal.html> (June 16, 2022).
- Rusmita, Sari. 2016. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Kalimantan Barat." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan* 5(3): 237.

- Sianturi Plamboyan Theresia, Andyarini Tri Kus. 2020. "Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal." *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia* (33): 6. <https://Www.Azores.Gov.Pt/Nr/Rdonlyres/D21cf49b-Ef59-4e76-88bd>.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet.
- Syafitri, Alvira Rahmi. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2014-2019)."
- UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah [JDIH BPK RI]. Bpk.go.id. Published 2022. Accessed September 5, 2022.
- Wahyuningsih, Panca, and Widaryanti Widaryanti. "Peningkatan PAD dan DAU terhadap Belanja Modal di Kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah." *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 12.1 (2015).
- Wandira, Arbie Gugus. "Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal." *Accounting Analysis Journal* 2.1 (2013).
- Widajantie, Tituk Dyah. 2021. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Belanja Langsung (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Periode 2016-2018)." *Jurnal Mebis (Manajemen Dan Bisnis)* 6(1): 31–40.



LAMPIRAN



## Tabulasi Data Penelitian

No	Kab/Kota	Tahun	BM	DAK	PAD	DAU
1	Kabupaten Bengkayang	2017	179.801	64,65	34.800	529.863
2	Kabupaten Bengkayang	2018	302.570	65,45	39.940	577.263
3	Kabupaten Bengkayang	2019	236.689	65,99	50.013	578.240
4	Kabupaten Bengkayang	2020	331.382	66,85	52.613	518.274
5	Kabupaten Bengkayang	2021	249.957	67,57	59.461	599.564
6	Kabupaten Landak	2017	310.662	64,12	49.947	619.248
7	Kabupaten Landak	2018	454.308	64,58	61.224	674.332
8	Kabupaten Landak	2019	322.568	64,93	70.899	675.216
9	Kabupaten Landak	2020	247.612	65,45	83.674	670.222
10	Kabupaten Landak	2021	209.342	65,96	84.105	683.669
11	Kabupaten Kapuas Hulu	2017	253.149	63,73	57.270	913.008
12	Kabupaten Kapuas Hulu	2018	459.241	63,83	40.164	983.714
13	Kabupaten Kapuas Hulu	2019	361.703	64,18	45.900	984.403
14	Kabupaten Kapuas Hulu	2020	346.127	65,03	67.658	975.757
15	Kabupaten Kapuas Hulu	2021	436.983	65,65	82.727	996.869
16	Kabupaten Ketapang	2017	455.876	64,03	85.931	1.070.560
17	Kabupaten Ketapang	2018	382.240	64,74	94.679	1.133.031
18	Kabupaten Ketapang	2019	444.444	65,71	103.715	1.215.197
19	Kabupaten Ketapang	2020	540.124	66,07	115.918	1.112.269
20	Kabupaten Ketapang	2021	670.237	67,16	132.828	1.148.116
21	Kabupaten Mempawah	2017	185.820	63,73	59.075	527.928
22	Kabupaten Mempawah	2018	323.806	63,84	57.545	585.452
23	Kabupaten Mempawah	2019	211.598	64,00	68.712	585.657
24	Kabupaten Mempawah	2020	137.847	64,90	69.902	583.210
25	Kabupaten Mempawah	2021	153.240	65,50	78.723	598.336
26	Kabupaten Sambas	2017	227.194	64,14	89.081	793.129
27	Kabupaten Sambas	2018	353.843	64,94	91.780	882.308
28	Kabupaten Sambas	2019	307.386	65,92	101.855	882.308
29	Kabupaten Sambas	2020	269.024	66,61	103.747	873.609
30	Kabupaten Sambas	2021	318.909	67,02	131.267	894.193
31	Kabupaten Sanggau	2017	297.059	63,37	84.856	760.206
32	Kabupaten Sanggau	2018	411.705	63,90	86.088	831.737
33	Kabupaten Sanggau	2019	343.624	64,93	87.825	861.857
34	Kabupaten Sanggau	2020	321.211	65,45	92.941	824.217
35	Kabupaten Sanggau	2021	324.067	65,96	102.036	843.057
36	Kabupaten Sintang	2017	286.477	64,18	82.412	868.072
37	Kabupaten Sintang	2018	421.798	64,78	94.000	925.671
38	Kabupaten Sintang	2019	348.334	65,16	97.500	925.671
39	Kabupaten Sintang	2020	306.010	66,07	177.661	909.410

40	Kabupaten Sintang	2021	347.946	66,70	150.923	933.800
41	Kabupaten Sekadau	2017	195.199	62,34	36.719	442.189
42	Kabupaten Sekadau	2018	282.453	62,52	43.787	506.927
43	Kabupaten Sekadau	2019	256.969	63,04	50.211	507.647
44	Kabupaten Sekadau	2020	262.023	63,69	55.485	504.548
45	Kabupaten Sekadau	2021	180.105	64,34	56.919	514.671
46	Kabupaten Melawi	2017	254.382	63,78	49.762	584.821
47	Kabupaten Melawi	2018	386.483	64,25	30.624	615.353
48	Kabupaten Melawi	2019	414.316	64,43	40.887	615.353
49	Kabupaten Melawi	2020	272.142	65,05	42.000	604.543
50	Kabupaten Melawi	2021	284.809	65,54	41.126	616.672
51	Kabupaten Kayong Utara	2017	191.851	60,09	23.464	415.876
52	Kabupaten Kayong Utara	2018	260.860	60,87	24.998	467.183
53	Kabupaten Kayong Utara	2019	262.676	61,52	25.327	468.175
54	Kabupaten Kayong Utara	2020	175.897	61,82	19.414	472.544
55	Kabupaten Kayong Utara	2021	179.227	62,66	22.225	486.572
56	Kabupaten Kubu Raya	2017	393.944	65,02	98.151	732.770
57	Kabupaten Kubu Raya	2018	423.562	65,54	132.323	787.062
58	Kabupaten Kubu Raya	2019	290.544	66,31	128.293	815.563
59	Kabupaten Kubu Raya	2020	308.891	67,23	136.495	782.647
60	Kabupaten Kubu Raya	2021	226.817	67,76	157.828	806.955
61	Kota Singkawang	2017	214.832	70,03	134.672	478.943
62	Kota Singkawang	2018	253.754	70,10	108.571	501.293
63	Kota Singkawang	2019	205.119	70,25	117.899	501.293
64	Kota Singkawang	2020	249.281	71,08	133.182	492.487
65	Kota Singkawang	2021	199.523	71,72	138.775	517.069
66	Kota Pontianak	2017	463.860	77,52	351.843	686.072
67	Kota Pontianak	2018	443.896	77,63	378.675	711.955
68	Kota Pontianak	2019	421.461	77,93	412.594	711.955
69	Kota Pontianak	2020	513.943	78,56	496.112	699.448
70	Kota Pontianak	2021	435.823	79,35	476.837	726.769

### Hasil Olahan Data

#### Uji CEM

Dependent Variable: BM  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 07/18/22 Time: 20:28  
 Sample: 2017 2021  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 14  
 Total panel (balanced) observations: 70

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	151.6265	349.3444	0.434031	0.6658
PAD	0.405723	0.225422	1.799838	0.0768
DAU	0.244163	0.052699	4.633176	0.0000
DAK	-0.009283	0.054327	-0.170875	0.8649
R-squared	0.466365	Mean dependent var		300.0559
Adjusted R-squared	0.440121	S.D. dependent var		89.08767
S.E. of regression	66.65992	Akaike info criterion		11.29665
Sum squared resid	271056.3	Schwarz criterion		11.43046
Log likelihood	-363.1411	Hannan-Quinn criter.		11.34944
F-statistic	17.77012	Durbin-Watson stat		1.541092
Prob(F-statistic)	0.000000			

Uji FEM

Dependent Variable: BM

Method: Panel Least Squares

Date: 07/18/22 Time: 20:29

Sample: 2017 2021

Periods included: 5

Cross-sections included: 14

Total panel (balanced) observations: 70

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1990.386	725.3544	2.744018	0.0085
PAD	0.182140	0.416500	0.437311	0.6638
DAU	1.164725	0.352792	3.301451	0.0018
DAK	0.379212	0.131591	2.881745	0.0059

## Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.695850	Mean dependent var	300.0559
Adjusted R-squared	0.602743	S.D. dependent var	89.08767
S.E. of regression	56.15050	Akaike info criterion	11.10369
Sum squared resid	154491.1	Schwarz criterion	11.63892
Log likelihood	-344.8699	Hannan-Quinn criter.	11.31487
F-statistic	7.473638	Durbin-Watson stat	2.203122
Prob(F-statistic)	0.000000		

## Uji REM

Dependent Variable: BM

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 07/18/22 Time: 20:36

Sample: 2017 2021

Periods included: 5

Cross-sections included: 14

Total panel (balanced) observations: 70

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	216.5281	394.0200	0.549536	0.5846
PAD	0.395228	0.254070	1.555584	0.1250
DAU	0.251701	0.066867	3.764217	0.0004
DAK	-0.019709	0.061458	-0.320692	0.7495
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			30.13949	0.2237
Idiosyncratic random			56.15050	0.7763
Weighted Statistics				
R-squared	0.292575	Mean dependent var		192.0686
Adjusted R-squared	0.257784	S.D. dependent var		71.09194
S.E. of regression	61.24712	Sum squared resid		228823.8
F-statistic	8.409406	Durbin-Watson stat		1.817871
Prob(F-statistic)	0.000092			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.462796	Mean dependent var		300.0559
Sum squared resid	272869.3	Durbin-Watson stat		1.524437

## Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.080919	(12,49)	0.0026
Cross-section Chi-square	36.542357	12	0.0003

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: BM

Method: Panel Least Squares

Date: 07/18/22 Time: 20:29

Sample: 2017 2021

Periods included: 5

Cross-sections included: 13

Total panel (balanced) observations: 65

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	151.6265	349.3444	0.434031	0.6658
PAD	0.405723	0.225422	1.799838	0.0768
DAU	0.244163	0.052699	4.633176	0.0000
DAK	-0.009283	0.054327	-0.170875	0.8649

R-squared	0.466365	Mean dependent var	300.0559
Adjusted R-squared	0.440121	S.D. dependent var	89.08767
S.E. of regression	66.65992	Akaike info criterion	11.29665
Sum squared resid	271056.3	Schwarz criterion	11.43046
Log likelihood	-363.1411	Hannan-Quinn criter.	11.34944
F-statistic	17.77012	Durbin-Watson stat	1.541092
Prob(F-statistic)	0.000000		

Uji *Hausman*

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	14.576141	3	0.0022

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PAD	0.182140	0.395228	0.108921	0.5185
DAU	1.164725	0.251701	0.119991	0.0084
DAK	-0.379212	-0.019709	0.013539	0.0020

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: BM

Method: Panel Least Squares

Date: 07/18/22 Time: 20:36

Sample: 2017 2021

Periods included: 5

Cross-sections included: 13

Total panel (balanced) observations: 65

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1990.386	725.3544	2.744018	0.0085
PAD	0.182140	0.416500	0.437311	0.6638
DAU	1.164725	0.352792	3.301451	0.0018
DAK	-0.379212	0.131591	-2.881745	0.0059

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

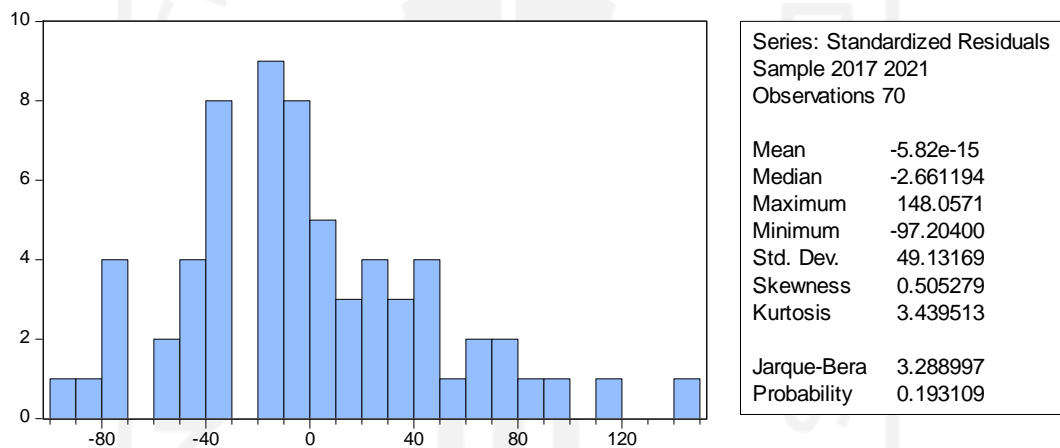
R-squared	0.695850	Mean dependent var	300.0559
Adjusted R-squared	0.602743	S.D. dependent var	89.08767
S.E. of regression	56.15050	Akaike info criterion	11.10369
Sum squared resid	154491.1	Schwarz criterion	11.63892
Log likelihood	-344.8699	Hannan-Quinn criter.	11.31487
F-statistic	7.473638	Durbin-Watson stat	2.303122
Prob(F-statistic)	0.000000		



## Uji Deskriptif

	BM	PAD	DAU	DAK
Mean	314.2365	104.0942	686.8435	6612.500
Maximum	670.2370	496.1120	1.215197	7935.000
Minimum	137.8470	19.41400	415.8760	6009.000
Std. Dev.	103.5889	97.46600	167.4149	398.9251
Jarque-Bera	7.508474	231.6457	4.737713	83.13125
Probability	0.023418	0.000000	0.093588	0.000000
Sum	21996.56	7286.593	44644.82	462875.0
Sum Sq. Dev.	740415.8	655473.8	1793775.	10980748
Observations	70	70	70	70

## Uji Normalitas



## Uji Autokorelasi

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.695850	Mean dependent var	300.0559
Adjusted R-squared	0.602743	S.D. dependent var	89.08767
S.E. of regression	56.15050	Akaike info criterion	11.10369
Sum squared resid	154491.1	Schwarz criterion	11.63892
Log likelihood	-344.8699	Hannan-Quinn criter.	11.31487
F-statistic	7.473638	Durbin-Watson stat	2.203122
Prob(F-statistic)	0.000000		

## Uji Multikolinearitas

	PAD	DAU	DAK
PAD	1.000000	0.192946	0.922481
DAU	0.192946	1.000000	0.075283
DAK	0.922481	0.075283	1.000000

## Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser			
F-statistic	0.792498	Prob. F(8,82)	0.4782
Obs*R-squared	5.680161	Prob. Chi-Square (5)	0.5776
Scaled explained SS	8.817190	Prob. Chi-Square (5)	0.2660

## Uji Parsial (Uji T)

Dependent Variable: BM				
Method: Panel Least Squares				
Date: 07/18/22 Time: 20:29				
Sample: 2017 2021				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 14				
Total panel (balanced) observations: 70				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1990.386	725.3544	2.744018	0.0085
PAD	0.182140	0.416500	0.437311	0.6638
DAU	1.164725	0.352792	3.301451	0.0018
DAK	0.379212	0.131591	2.881745	0.0059
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.695850	Mean dependent var	300.0559	
Adjusted R-squared	0.602743	S.D. dependent var	89.08767	
S.E. of regression	56.15050	Akaike info criterion	11.10369	
Sum squared resid	154491.1	Schwarz criterion	11.63892	
Log likelihood	-344.8699	Hannan-Quinn criter.	11.31487	
F-statistic	7.473638	Durbin-Watson stat	2.203122	
Prob(F-statistic)	0.000000			

## Uji Simultan (Uji F)

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.695850	Mean dependent var	300.0559
Adjusted R-squared	0.602743	S.D. dependent var	89.08767
S.E. of regression	56.15050	Akaike info criterion	11.10369
Sum squared resid	154491.1	Schwarz criterion	11.63892
Log likelihood	-344.8699	Hannan-Quinn criter.	11.31487
F-statistic	7.473638	Durbin-Watson stat	2.203122
Prob(F-statistic)	0.000000		

Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.695850	Mean dependent var	300.0559
Adjusted R-squared	0.602743	S.D. dependent var	89.08767
S.E. of regression	56.15050	Akaike info criterion	11.10369
Sum squared resid	154491.1	Schwarz criterion	11.63892
Log likelihood	-344.8699	Hannan-Quinn criter.	11.31487
F-statistic	7.473638	Durbin-Watson stat	2.203122
Prob(F-statistic)	0.000000		